# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah

Provinsi DKI Jakarta

2022

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022 selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2022. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara obyektif dan transparan serta mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2022. Semoga LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerjanya dan dapat menjadi bahan masukan serta umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 26 Januari 2023

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

# EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan Rencana Strategis baik keberhasilan maupun kegagalan dan juga sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2022, Sekretariat Dareah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2022.

Dalam upaya mewujudkan misi dan dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan melalui 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis dan 60 (enam puluh) indikator kinerja sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagian besar indikator kinerja berhasil memperoleh capaian kinerja pada kisaran 90%-100%. Terdapat 3 indikator sasaran yaitu Skor EKPPD, Indeks Reformasi Birokrasi serta Nilai / Predikat AKIP yang nilai / skornya belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga capaian atas indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung ataupun dibandingkan dengan target Nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran dari 9 program yang ada pada 10 Biro adalah sebesar 97,66%, dimana jumlah seluruh anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.1.193.443.576.535 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.165.501.774.396.

Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program sesuai dengan rencana kerjanya dan diharapkan dapat menjadi bahan penilaian atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang ..... I-1
B. Pembentukan ..... I-2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ..... I-3
D. Struktur Organisasi ..... I-4
E. Personil Sekretariat Daerah ..... I-5
F. Aspek Strategis ..... I-6
G. Permasalahan dan Arah Kebijakan..... I-6
H. Tujuan Penyusunan LKIP..... I-7
I. Sistematika Penulisan ..... I-7

**BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**
A. Perencanaan Kinerja..... II-1
B. Perjanjian Kinerja ..... II-7
C. Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD ..... II-25

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah ..... III-1
B. Realisasi Anggaran ..... III-76

**BAB IV PENUTUP**
A. Kesimpulan..... IV-1

Lampiran 1 Bagan Pola Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Lampiran 2 Formulir Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel II.1 | Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 …… | II-7 |
| Tabel II.2 | Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... | II-25 |
| Tabel II.3 | Pagu Anggaran Tahun 2022 | II-29 |
| Tabel III.1 | Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ..... | III-2 |
| Tabel III.2 | Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja …… | III-21 |
| Tabel III.3 | Perbandingan Realisasi Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya …… | III-24 |
| Tabel III.4 | Perbandingan Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya | III-25 |
| Tabel III.5 | Perbandingan realisasi Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya …….. | III-29 |
| Tabel III.6 | Perbandingan realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya …… | III-30 |
| Tabel III.7 | Penjelasan atas Capaian IKU Penunjang pada Biro Pemerintahan | III-32 |
| Tabel III.8 | Perbandingan realisasi Program Penataan Organisasi…….. | III-38 |
| Tabel III.9 | Perbandingan realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Organisas dan Reformsi Birokrasi dengan tahun sebelumnya ……..... | III-39 |
| Tabel III.10 | Realisasi pagu anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi … | III-41 |
| Tabel III.11 | Realisasi Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada Biro Umum dan Administrasi..... | III-44 |
| Tabel III.12 | Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan tahun sebelumnya.... | III-55 |
| Tabel III.13 | Dasar Keputusan Mendagri atas Realisasi IKU pada Biro Pemerintahan …… | III-57 |
| Tabel III.14 | Data efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 …… | III-61 |
| Tabel III.15 | Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja Sekretariat Daerah ……. | III-68 |
| Tabel III.16 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan Keuangan dengan IPM Target Provinsi dan IPM Target Nasional Tahun 2022 …… | III-78 |
| Tabel III.17 | Realisasi Anggaran …… | III-80 |

# DAFTAR GRAFIK


| | | |
|---|---|---|
| Grafik I.1 | Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ……. | I-5 |
| Grafik I.2 | Jumlah Pegawai Sekertariat Daerah Berdasarkan Usia ……. | I-5 |
| Grafik I.3 | Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan …….. | I-6 |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi sebagai wujud *good governance* dengan prinsip pemerintahan yang bersih, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Wujud *good governance* tersebut dilakukan melalui peningkatan aparatur negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang semuanya mengarah pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut adalah dengan penyusunan Laporan Akuntabilitias Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Secara umum Laporan ini merupakan naskah pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas Rencana Strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pandangan yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan yang antara lain adalah :

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang mewajibkan Seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan menjalankan sumber daya yang dimiliki.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kerja Kinerja Instansi Pemerintahan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2021
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022.
- Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022

## B. PEMBENTUKAN

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Implementasi dari peraturan daerah tersebut maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

**Kedudukan**

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

**Tugas**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian tehadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif.

a. Mengordinasikan dan menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
c. Mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
d. Mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur;
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

**Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah;
c. penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;
d. pengordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh PD;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD;
g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;
h. penyelenggaraan pemerintahan, hukukm, organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama daerah;
i. penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
j. penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
k. pelaksaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan terdiri atas :
   1) Biro Pemerintahan;
   2) Biro Hukum;
   3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
   4) Biro Kepala Daerah; dan
   5) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
c. Asisten Perekonomian dan Keuangan terdiri atas :
   1) Biro Perekonomian dan Keuangan; dan
   2) Biro Kerja Sama Daerah
d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
   1) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
e. Asisten Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
   1) Biro Kesejahteraan Sosial; dan
   2) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

## E. PERSONIL SEKRETARIAT DAERAH

Dalam menunjang Kinerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta khususnya Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 617 pegawai per 31 Desember 2022.

**Grafik I.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta**

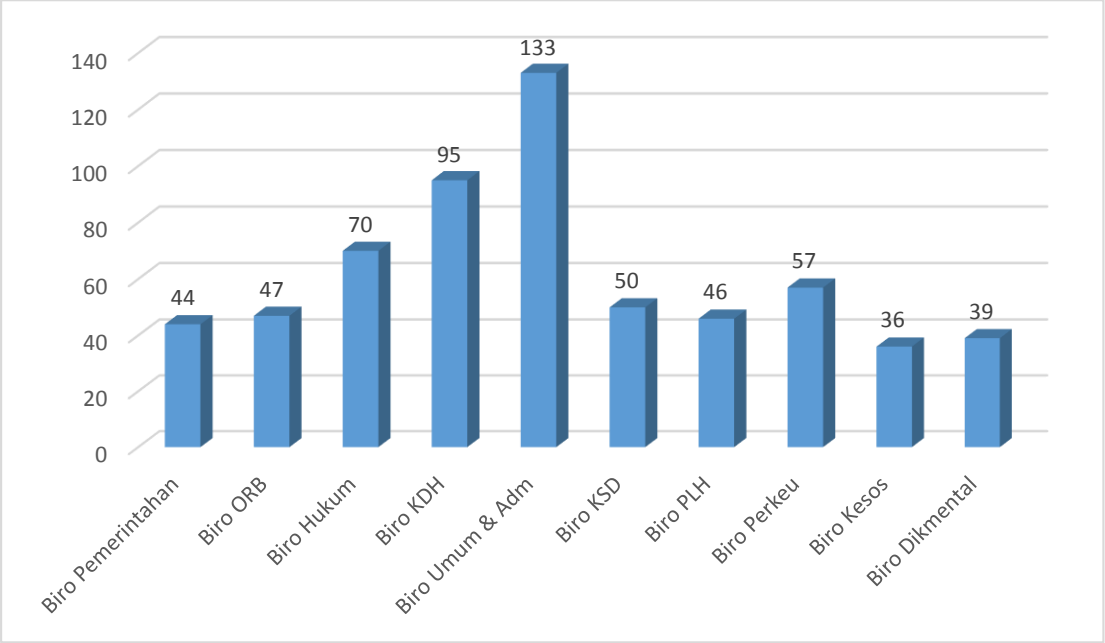


**Grafik I.2 Jumlah Pegawai Sekertariat Daerah Berdasarkan Usia**

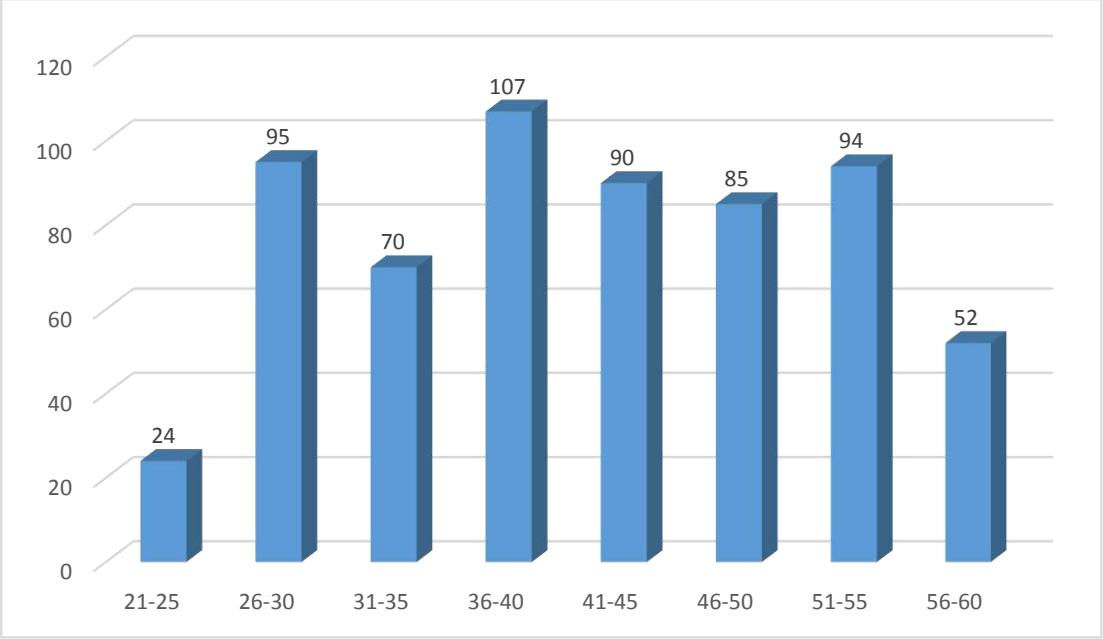

**Grafik I.3 Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan**

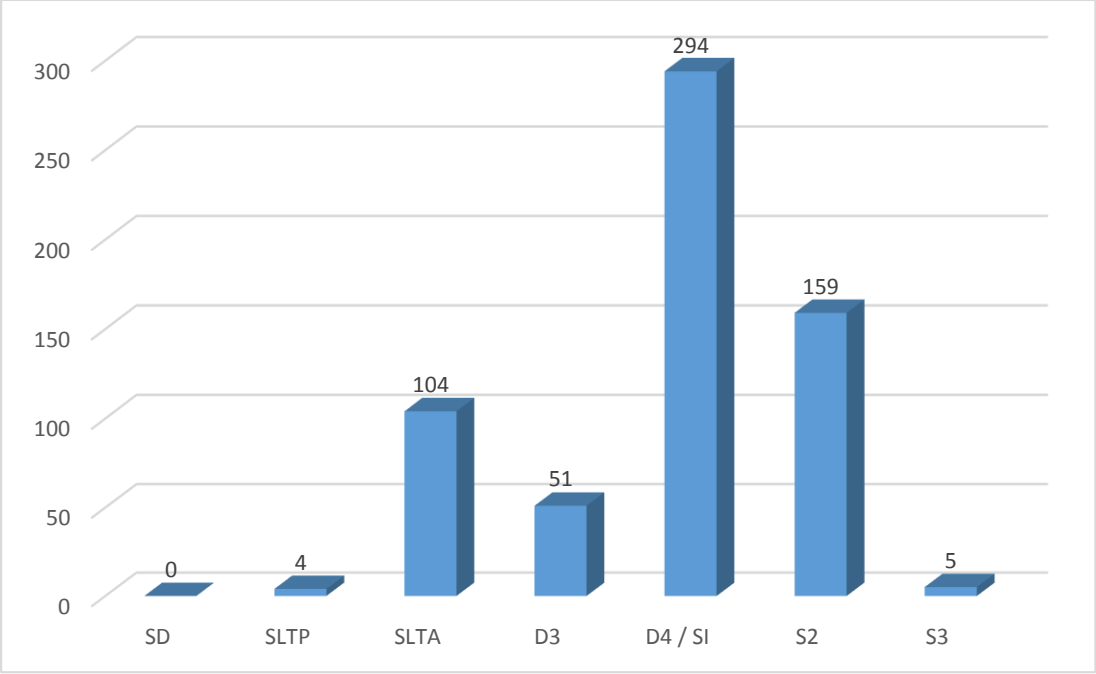


## F. ASPEK STRATEGIS

Posisi dan peranan perangkat Sekretariat Daerah didalam membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, merupakan posisi yang sangat strategis. Dalam implementasi benchmark position dan benchmark job Sekretariat Daerah tersebut adalah Mengelola Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kompeten.

## G. PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Kota Jakarta adalah kota multi etnis dengan penduduk yang terdiri dari beraneka macam suku, budaya, bahasa dan agama sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat rumit, oleh sebab itu didalam membangun dan mengatur pola kehidupan di Jakarta harus mendalam, saling terkait dan penanganannya harus menyeluruh agar menyentuh akar permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan kewajiban bersama seluruh perangkat daerah termasuk

Sekretaris Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah. Oleh sebab itu organisasi di bawah Sekretariat Daerah harus bekerja bahu membahu untuk menangani permasalahan tersebut sehingga dalam menentukan arah kebijakan dapat tepat sasaran secara berkesinambungan.

## H. TUJUAN PENYUSUNAN LKIP

Di era keterbukaan dan reformasi birokrasi sekarang ini menuntut adanya perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah diharapkan selalu mengakomodir kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Dalam kondisi seperti ini dituntut adanya kerangka berpikir yang terstruktur untuk lebih memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya. Selain itu Pemerintah dituntut untuk meningkatkan etos kerja dan budaya yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabiltas menuju pemerintahan yang bersih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baik, bersih, berwibawa dan bertangung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui kerja yang efektif dan efisien.

Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka Sekretariat Daerah melaksanakan pengukuran kinerja yang merupakan manifestasi sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Dengan satuan pengukuran yang baku maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik. Pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk menyampaikan data yang tepat dan akurat.

## I. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran singkat tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

**BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja organisasi dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2022. Pada bab ini diuraikan juga analisis capaian kinerja yang meliputi pebandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, perbandingan antara realisasi tahun ini dengan target RPJMD dalam dokumen perencanaan strategis, dan perbandingan dengan standar nasional (jika ada). Selain itu dilakukan pula analisis penyebab kebehasilan / kegagalan kinerja, analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan (bisa KSD) serta realisasi anggaran.

**BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## A. PERENCANAAN KINERJA

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2021, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Didalam RPJMD 2017-2022, program pembangunan dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu :

1. Program Unggulan, adalah program yang menjadi prioritas utama Gubernur dalam pencapaian visi – misi RPJMD.
2. Program Prioritas, adalah program yang menjadi fokus daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD.
3. Program Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, adalah program dalam rangka pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah khususnya yang terkait dengan pelayanan publik maupun tugas-tugas birokrasi lainnya.
4. Program Operasional Perangkat Daerah, adalah program yang mewadahi kebutuhan minimal beroperasinya sebuah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tupoksinya.

Program Unggulan sebagaimana dimaksud diatas berdasar pengelompokan isu adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan
b. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan
c. Penguatan Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas
d. Permuliaan Perempuan
e. Pemuda dan Olahraga
f. Penguatan Ketahanan Pangan
g. Industri Kreatif yang Berdaya Saing
h. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
i. Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan

j. Ketahanan energi
k. Pembangunan Sistem Transportasi
l. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
m. Reformasi Birokrasi
n. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan
o. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota
p. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
q. Pembangunan Budaya Multikultur
r. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Sesuai dengan Isu-isu yang menjadi program unggulan Gubernur diturunkan menjadi isu-isu yang ada pada Sekertariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Biro Pemerintahan sebagai Biro yang mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pembinaan urusan pemerintahan dapat diidentifikasi ke dalam 4 Kelompok isu strategis, yaitu :
   1) Isu-isu Strategis Otonomi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
   2) Isu-isu Strategis Kewilayahan
   3) Isu-isu Strategis Pengaduan
   4) Isu-isu Strategis Tata Praja
b. Biro Hukum sebagai Biro dengan tugas utama melaksanakan fasilitasi, penyelarasan dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, serta penyelesaian sengketa dan penanganan perkara. Peningkatan penataan perundang-undangan menjadi fokus utama sebagai salah satu komponen penunjang dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Penguatan penataan peraturan perundang-undangan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui
   1) Deregulasi Produk Hukum Daerah dengan simplifikasi dan Omnibuslaw.
   2) Merencanakan penyusunan Produk Hukum Daerah melalui penetapan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 yang pelaksanaan penyusunan melalui digitalisasi sistem informasi e -produk hukum serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 melalui

Keputusan DPRD guna akuntabilitas , kemudahan dan ketepatan proses produk hukum daerah.

3) Penetapan Indeks Kualitas kebijakan sebagai alat ukur dalam perjanjian kinerja Biro Hukum guna meningkatkan nilai kualitas kebijakan produk hukum daerah Provinsi DKI Jakarta

Selain itu dalam hal penanganan perkara Biro Hukum bersama unit terkait berusaha meningkatkan bukti/dokumen dalam perkara asset yang ditangani guna meningkatkan perlindungan dan penyelamatan asset pemerintah Provinsi DKI Jakarta

c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagai pengampu utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait 4 aspek dalam 8 aspek area perubahan yakni Penguatan organisasi, penataan tatalaksana, peningkatan kualitas pelayanan publik dan manajemen perubahan mendukung isu reformasi birokrasi

d. Biro–Perekonomian dan Keuangan sebagai Biro yang mengoordinasikan kebijakan dalam urusan pariwisata, perindustrian, perdagangan, KUKM, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, energi, penanaman modal, pangan, kelautan, perikanan, pertanian, dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat kebijakan untuk Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam mendukung Isu Penguatan Ketahanan Pangan, isu Industri Kreatif yang Berdaya Saing, isu Penguraan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja, isu Ketahanan energi, isu Pembangunan Sistem Transportasi.

e. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi, permukiman, persampahan, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

lingkungan hidup, kehutanan, dan penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi.

f. Biro Kesejahteraan Sosial merupakan Biro yang mengoordinasikan kebijakan dalam berbagai Kebijakan seperti Kebijakan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kebijakan Sosial, kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Kebijakan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Biro Kesejahteraan Sosial dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat memliki tugas seperti :
   1) Pembangunan stadion olahraga bersifat internasional;
   2) Peningkatan kesejahteraan lansia melalui kartu lansia Jakarta (KLJ);
   3) Pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial;
   4) Peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas;
   5) Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   6) Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan integratif

g. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebagai Biro yang mengoordinasikan kebijakan dalam urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, serta mental spiritual sesuai dengan tugas dan fungsinya mampu membuat kebijakan untuk Perangkat Daerah di bawah koordinasnya yakni Dinas Pendidikan dalam mendukung isu Peningkatan Kualitas Pendidikan, Dinas Kebudayaan untuk Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan dan Terwujudnya Pelestarian, Dinas Perpustaakaan dan Kearsipan dalam mendukung Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat, Peningkatan Sadar Tertib Arsip,fasilitasi kebijakan terkait mental spiritual

Selain isu isu Gubernur yang menjadi fokus pada Biro ada juga beberapa biro yang tidak langsung mengampu isu utama sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 namun memiliki fungsi penunjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memiki isu internal seperti yang dijabarkan pada Renstra Sekda Tahun 2017-2022 yakni :

a. Biro Kepala Daerah sebagai Biro yang menunjang urusan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

b. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, dan pengamanan dalam kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks gedung Balaikota, perlengkapan dan sarana acara, Administrasi Sekretariat Daerah, Deputi Gubernur dan Ketatausahaan Sekretariat Daerah.
c. Biro Kerja Sama Daerah menunjang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dan perjalanan dinas. Biro Kerja Sama Daerah merupakan Biro yang terbentuk karena pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang mengakibatkan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran capaian kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2020, sementara untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dapat dilakukan pengukuran dan penilaian capaian kinerja.

Dari isu-isu Gubernur diatas dijabarkan dalam 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang mewakili seluruh Biro yakni :

a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan
b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
c. Terwujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur
d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi
e. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis, transparan dan akuntabel serta model organisasi pemerintahan yang dinamis
f. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis
g. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas

h. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional
i. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasiskan data
j. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta
k. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran
l. Meningkatnya pertumbuhan investasi
m. Meningkatnya akses sanitasi layak
n. Meningkatnya kewirausahaan baru
o. Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi
p. Meningkatnya kerja sama/kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pihak
q. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
r. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya
s. Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak
t. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua
u. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
v. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat

## B. PERJANJIAN KINERJA

**Tabel II.1**
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022**

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Fungsi Pemerintahan | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis, transparan dan akuntabel serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | 3,300 | Nilai |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | Indeks |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | Persen |
| 4 | Meningkatnya kewirausahaan baru | Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20) | 100% | Persen |
| 5 | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12) | 100% | Persen |
| 6 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta Nomor (70) | 100% | Persen |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39) | 100% | Persen |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60) | 100% | Persen |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan | 100% | Persen |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | | Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61) | | |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63) | 100% | Persen |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 9 | Menyelesaikan penegasan batas wilayah sesuai SE Kemendagri Nomor 903 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Prioritas | Persentase penyelesaian penegasan batas wilayah Kelurahan | 100% | Persen |
| 10 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100% | Persen |
| 11 | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | Persen |
| 12 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan keuangan daerah | 3 | Nilai |
| 13 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | Persen |
| 14 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | 91 | Nilai |
| 15 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | Persen |
| 16 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | Persen |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 16 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | Persen |
| 17 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | Persen |
| 18 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut | 100% | Persen |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | | |
| Fungsi Hukum | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | Nilai |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi | 5 | % |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 | Persen |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase penyelesaian Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | 100 | % |
| 5 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | 100 | % |
| 6 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Persentase penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29) | 100% | % |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | 100% | % |
| 8 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | 100 | % |
| 9 | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyaraka | Persentase penyelesaian Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun | 100 | % |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | | Milik (KSD Nomor 58) | | |
| 10 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | ersentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | 100 | % |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | 100 | % |
| 12 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian Deregulasi/Penataan Produk Hukum Daerah (KSD Nomor 65) | 100 | % |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 13 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100 | % |
| 14 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100 | % |
| 15 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan keuangan daerah | 3 | WTP |
| 16 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | 91 | Predikat |
| 17 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | % |
| 18 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100 | % |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 19 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | % |
| 20 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil | 100% | % |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | pemeriksaan eksternal (BPK) | | |
| 21 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | % |
| Fungsi Organisasi Dan Reformasi Birokrasi | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase OPD yang telah melaksanakan 8 area perubahan reformasi birokrasi berdasarkan hasil pengukuran capaian reformasi birokrasi | 100 | Persen |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Nilai/Predikat AKIP | AA (91) | Nilai |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | Persen |
| 4 | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58) | 100% | Persentase |
| 5 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62) | 100% | Persentase |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63) | 100% | Persentase |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 7 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan Keuangan | (3) WTP | Predikat |
| 8 | Meningkatknya Pemanfaatan E- | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | Persen |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| 9 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | Persen |
| 10 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA (91) | Predikat |
| 11 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | Persentase |
| 12 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | Persentase |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 13 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | Persen |
| 14 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | Persen |
| 15 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | Persen |
| Fungsi Kepala Daerah | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | 4 | Nilai |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 | Persen |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39) | 100 | Persentase |
| 4 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61) | 100 | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 5 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100 | Persentase |
| 6 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100 | Persentase |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan keuangan daerah | 3 | WTP |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | 91 | Predikat |
| 9 | Persentase Pemakaian e-office | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100 | Persentase |
| 10 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100 | Persentase |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 11 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100 | Persentase |
| 12 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100 | Persentase |
| 13 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100 | Persentase |
| Fungsi Umum Dan Administrasi | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan | 4 | Indeks |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan Integratif Nomor (12) | 100% | Persentase |
| 4. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | 100% | Persentase |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 5. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini Laporan Keuangan | (3) WTP | Predikat |
| 6. | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | Presentase |
| 7. | Terimplementasinya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk Program-Program Umum dan Unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100% | Persentase |
| 8. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA (91) | Predikat |
| 9. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 | 95 | Nilai |
| 10. | Peningkatan Penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi | 100% | Persentase |
| 11. | Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | Persentase |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 12. | Terselesaikannya Tindak | Persentase capaian | 100% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | Lanjut Arahan Gubernur | penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | | |
| 13. | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | Persentase |
| 14. | Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | Persentase |
| Fungsi Perekonomian Dan Keuangan | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Skor EKPPD | 3,3 | Nilai |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | Indeks |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | Persentase |
| 4 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (KSD 71) | 100% | Persentase |
| 5 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta (KSD 70) | 100% | Persentase |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD 39) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD 61) | 100% | Persentase |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 7 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100% | Persentase |
| 8 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan Keuangan | 3 (WTP) | Predikat |
| 9 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| 10 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | Persentase |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA (91) | Predikat |
| 12 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | Persentase |
| 13 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | Persentase |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 14 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | Persentase |
| 15 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | Persentase |
| 16 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | Persentase |
| Fungsi Kerja Sama Daerah | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasiskan data | Skor EKPPD | 3,3 | NIlai |
| 2 | Meningkatnya kerja sama/kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pihak | Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi | 100% | Persentase |
| 3 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | Persentase |
| 4 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal Nomor (22) | 100% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembngunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23) | 100% | Persentase |
| 6 | Meningkatnya kewirausahaan baru | Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20) | 100% | Persentase |
| 7 | Terwujudnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71) | 100% | Persentase |
| 8 | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58) | 100% | Persentase |
| 9 | Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15) | 100% | Persentase |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 10 | Terlaksananya kolaborasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Jumlah kolaborator | 550 | Kolaborator |
| 11 | Terlaksananya JDCN Forum 2022 | Jumlah Audience JDCN Forum 2022 | 5 juta | Viewer |
| 12 | Terbitnya Rancangan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan Kerjasama di Pemprov DKI Jakarta dengan didukung terbitnya SOP Kerjasama | Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan kerjasama | 100% | Persentase |
| 13 | Tersedianya platform kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi | Produk Hukum Platform Kolaborasi terbit | 100% | Persentase |
| | | Persentase Pembangunan Platform Kolaborasi | 100% | Persentase |
| | | Jumlah program kolaborasi | 100% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | | baru di platform kolaborasi (Jakarta Development Collaboration Network) | | |
| 14 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan keuangan | (3) WTP | Predikat |
| 15 | Meningkatnya pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Presentase Pemanfaatan E-Order | 100% | Persentase |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 16 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | Persentase |
| 17 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | Persentase |
| 18 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | Persentase |
| Fungsi Pembangunan Dan Lingkungan Hidup | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2,00 | indeks |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | 3,30 | Skor |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 | Persen |
| 4 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72) | 100 | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53) | 100 | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian | 100 | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | | rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71) | | |
| 5 | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58) | 100 | Persentase |
| 6 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta Nomor (70) | 100 | Persentase |
| 7 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10) | 100 | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Nomor (28) | 100 | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45) | 100 | Persentase |
| 8 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29) | 100 | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73) | 100 | Persentase |
| 9 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | 100 | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nomor (41) | 100 | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | 100 | Persentase |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 10 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100 | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan Keuangan | (3) WTP | Predikat |
| 12 | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100 | Persentase |
| 13 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100 | Persentase |
| 14 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA (91) | Predikat |
| 15 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100 | Persentase |
| 16 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100 | Persentase |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 17 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100 | Persentase |
| 18 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100 | Persentase |
| 19 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100 | Persentase |
| Fungsi Kesejahteraan Sosial | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan. | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | Nilai |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntable | Skor EKPPD | 3,30 | Nilai |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | Persentase |
| 4 | Terjaminnya akses dan | Persentase penyelesaian | 100% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | rencana aksi pengentasan kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42) | | |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Nomor (11) | 100% | Persentase |
| | | Persentase peyelesaian rencana aksi Penyedian Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan integratif Nomor (12) | 100% | Persentase |
| 5 | Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak | Persentase penyelesaian rencana aksi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>Nomor (13) | 100% | Persentase |
| 6 | Terwujudnya Jakarta sebagai Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing Internasional | Presentasi Penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Destinasi DKI Jakarta Nomor (70) | 100% | Presentase |
| 7 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan Aksesibilitas penyandang Disabilitas Nomor (14) | 100% | Persentase |
| | | Presentase Penyelesaian rencana aksi pembangunan Stadion Olahraga bertaraf Internasional Nomor (10) | 100% | Presentase |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntable | Persentase penyelesaian rencna aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | 100% | Persentase |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 9 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100% | Persentase |
| 10 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini Laporan Keuagan | 3 (WTP) | Predikat |
| 11 | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Terimplementasinya Rencana Strategi Komunikasi Publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Presentasi Implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100% | Presentase |
| 13 | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA(91) | Predikat |
| 14 | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah | Jumlah Paket Pengadaan Barang / Jasa Melalui Swakelola tipe III/IV | N/A | Paket |
| 15 | Peningkatan Penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | Presentase |
| 16 | Peningkatan penggunaan e-Produk Hukum | Jumlah Perbal / Produk Hukum yang di buat melalui sistem e-perbal | 100% | Presentase |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 17 | Terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur | 100% | Persentase |
| 18 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | Persentase |
| 19 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | Persentase |
| Fungsi Pendidikan Dan Mental Spiritual | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | 3,3 | Nilai |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 | Persentase |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | Indeks |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (nomor 1) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Sekilah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi (nomor 3) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan (nomor 5) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) (nomor 6) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD (nomor 8) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (nomor 12) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Sekolah Kolaborasi (nomor 37) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Bemar Membaca (nomor 69) | 100% | Persentase |
| 5 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14) | 100% | Persentase |
| 6 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitaslisasi Taman Ismail Marzuki (nomor 19) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta | 100% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | | (KSD Nomor 70) | | |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana akasi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah (nomor 61) | 100% | Persentase |
| *Sasaran Khusus* | | | | |
| 8 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100% | Persentase |
| 9 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan Keuangan | 3 | WTP |
| 10 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | Persentase |
| 11 | Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi | Jumlah kolaborator Jakarta | 20 | |
| 12 | Terwujudnya kepuasan Layanan mental spiritual | Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan mental spritual | 85 | Persentase |
| 13 | Terselesaikannya dan terpublikasikannya penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/ keagamaan dan tempat ibadah di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah organisasi kemasyarakatan /keagamaan dan tempat ibadah penerima belanja hibah | 4 | Laporan |
| 14 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | Persentase |
| 15 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | 91 | Nilai |
| 16 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | Persentase |
| 17 | Peningkatan | Jumlah Surat atau Nota | 100% | Persentase |

| No | Sasaran indikator | Indikator sasaran | Target | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| | penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | | |
| *Sasaran Operasional* | | | | |
| 18 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | Persentase |
| 19 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | Persentase |
| 20 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | Persentase |

## C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Berikut ini akan dikemukanan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut :

**Tabel II.2**
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Biro Pemerintahan** | | | | | | | | |
| 1 | Skor EKPPD | 3.056 | 3.100 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 3.300 | 3.300 |
| 2 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 | 0 | 0 | 100 | 91 | 91 | 91 |
| **Biro Hukum** | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan Kesadaran hukum dan HAM | 56% | 0% | 75% | 88% | 94% | 100 % | 100 % |

| No | Indikator | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Persentase regulasi yang harmonis | 90% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Persentase penyelesaian sengketa pertanahan | 0% | 0% | 85% | 85 % | 90% | 100 % | 100 % |
| 4 | Persentase penanganan perkara di pengadilan | 70% | 80% | 85% | 85% | 90% | 100% | 100 % |
| **Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | 63.75 | 68 | 73 | 78 | 85 | 91 | 91 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | - | - | 83 | 86 | 88 | 88.5 | 88.5 |
| 4 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Biro Kepala Daerah** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Kepala Daerah | 0 | 0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Indeks Kepuasan Stakholders atas Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks |
| 4 | Indeks Kepuasan pelayanan Kendaraan Operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks |
| **Biro Umum dan Administrasi Setda** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks |
| 2 | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan | 3,65 Indeks | 3,65 | 3,67 | 3,7 | 3,72 | 3,75 | 3,75 Indeks |
| 3 | Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana | 0 % | 46,83 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 46,83% |

| No | Indikator | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Kerumahtanggaan Daerah | | | | | | | |
| 4 | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan | 3,62 Indeks | 3,65 Indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65% |
| 5 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional | 2 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks | 4 Indeks |
| **Biro Perekonomian dan Keuangan** | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus |
| 2 | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus |
| 3 | Indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks |
| **Biro Kerja Sama Daerah** | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah penyelenggaraan pelayanan keuangan perjalanan dinas SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (diluar Sekretariat DPRD) | 0 | 0 | 0 | 475 | 490 | 510 | 1.475 Perjalanan |
| 2 | Persentase Kerja Sama Dalam Negeri yang difasilitasi/ diimplementasikan | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang difasilitasi/ diimplementasikan | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Indeks kepuasan pelayanan kantor | 0 | 0 | 0 | 3 Indeks | 3 Indeks | 3 Indeks | 3 Indeks |
| **Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan | 0% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |

| No | Indikator | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 2 | Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% |
| 3 | Indeks kepuasan pelayanan kantor | 0 | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks |
| **Biro Kesejahteraan Sosial** | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks | 4 indeks |
| **Biro Pendidikan dan Mental Spiritual** | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Ketidaksesuaian antara Kebijakan dengan Peraturan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah Ketidaksesuaian antara Peraturan dengan Pelaksanaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Mental Spiritual | 0 | 0 | 82 | 85 | 87 | 90 | 90 |
| 4 | Indeks Kepuasan Jemaah Haji DKI Jakarta Terhadap Layanan Petugas Haji Daerah | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tercantum pada tabel Perjanjian Kinerja tahun 2022 diatas, maka besaran alokasi Program dan Kegiatan pada masing-masing biro di Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana berikut :

**Tabel II.3**
**Pagu Anggaran Tahun 2022**

| No | Program | Pagu | Kegiatan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| **Fungsi Pemerintahan** | | | | |
| 1 | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 5.187.869.226 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 4.276.622.366 |
| | | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | 911.246.860 |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 5.187.869.226 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 146.750.314 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 126.720.000 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 19.601.043 |
| | | | Fasilitasi Keprotokolan | 409.881.478 |
| **Fungsi Hukum** | | | | |
| 1. | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 2.299.005.832 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | 141.709.888 |
| | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | 2.157.295.944 |
| 2. | Pengelolaan Kota Administrasi | 43.600.000 | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi<br>Fasilitasi Bantuan Hukum | 43.600.000 |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 0 |
| | | | Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 83.988.800 |
| | | | Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 397.048.873 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 168.960.000 |
| 3. | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 422.675.000 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 422.675.000 |
| **Fungsi Organisasi dan Reformasi Birokrasi** | | | | |
| 1. | Program Penataan Organisasi | 345.300.000 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 108.300.000 |
| | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 472.080.700 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 131.905.507 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 311.000 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 56.671.307 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.923.200 |
| **Fungsi Kepala Daerah** | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan | 9.488.672.160 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala | 2.183.796.000 |

| No | Program | Pagu | Kegiatan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| | Pemerintah Daerah Provinsi | | Daerah | |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 736.796.000 |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 894.945.620 |
| | | | Penyiapan Materi Pimpinan | 196.800.000 |
| | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 73.660.500 |
| | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1.895.732.770 |
| | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 423.103.885 |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 9.488.672.160 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 188.493.423 |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.126.321 |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 123.412.372 |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | 827.252.690 |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 101.763.640 |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 117.538.044 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 257.241.600 |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 262.231.200 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 456.999.623 |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.550.208 |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.360.103.066 |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 736.796.000 |
| | | | Penyiapan Materi Pimpinan | 196.800.000 |
| | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 249.967.566 |
| | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 2.248.346.902 |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan | 894.945.620 |

| No | Program | Pagu | Kegiatan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| | | | Wakil Kepala Daerah | |
| | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 423.103.885 |
| **Unsur Umum Dan Administrasi** | | | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 772.585.809.867 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 582.095.689.778 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9.490.742.601 |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 161.756.320 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 39.399.714.789 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28.819.807.084 |
| | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 67.721.627.720 |
| | | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 5.111.283.879 |
| | | | Fasilitasi Keprotokolan | 7.558.513.768 |
| **Unsur Perekonomian Dan Keuangan** | | | | |
| 1 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 148.500.000 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | 148.500.000 |
| 2 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 61.001.265 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 61.001.265 |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 215.010.584 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 800.000 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 300.662.994 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 112.384.800 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16.310.437 |
| **Biro Kerjasama Daerah** | | | | |
| 1 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 47.755.795.440 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 44.132.852.500 |
| | | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 3.622.942.940 |
| 2 | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 20.004.652.720 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 20.004.652.720 |
| 3 | Program Penunjang Urusan | 1.085.602.223 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.998.500 |

| No | Program | Pagu | Kegiatan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| | Pemerintahan Daerah Provinsi | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 555.117.988 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 467.747.484 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 47.738.251 |
| **Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup** | | | | |
| 1 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 183.718.080 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 183.718.080 |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 650.268.451 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.062.160 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 283.329.769 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 333.764.946 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.111.576 |
| **Biro Kesejahteraan Sosial** | | | | |
| 1 | Program Kesejahteraan Rakyat | 245.098.537 | Fasilitasi Pengembangan Kesjahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 131.880.000 |
| | | | Fasilitasi Pengembangan Kesjahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 56.760.000 |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 245.098.537 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 320.000 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 195.523.067 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37.461.600 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.793.870 |
| 3 | Program Penataan Organisasi | 88.930.000 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 88.930.000 |
| **Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual** | | | | |
| 1 | Program Kesejahteraan Rakyat | 356.000.369.673 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | 355.909.629.673 |
| | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 90.740.000 |
| 2 | Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | 169.005.370 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.000.000 |
| | | | Admnistrasi Umum Perangkat Daerah | 78.669.154 |

| No | Program | Pagu | Kegiatan | Pagu |
|---|---|---|---|---|
| | Provinsi | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 37.461.600 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 49.874.616 |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum | 54.600.000 |

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2022, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Adapun tingkat capaian kinerja Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel III.1**
**Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fungsi Pemerintahan | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis, transparan dan akuntabel serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | 3,300 | N/A | N/A |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | 94.89% | 100% |
| 4 | Meningkatnya kewirausahaan baru | Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12) | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta Nomor (70) | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61) | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63) | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | akuntabel serta berbasis teknologi informasi | | | | |
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 9 | Menyelesaikan penegasan batas wilayah sesuai SE Kemendagri Nomor 903 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Prioritas | Persentase penyelesaian penegasan batas wilayah Kelurahan | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan keuangan daerah | 3 | 3 | 100% |
| 13 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | 91 | 93,79 | 100% |
| 15 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 16 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |
| Fungsi Hukum | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | 3 | 100% |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi | 5 | 5 | 100% |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 | 90,38 | 99% |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase penyelesaian Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Persentase penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29) | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyaraka | Persentase penyelesaian Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (KSD Nomor 58) | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | ersentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 12 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan keuangan daerah | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | 91 | 91 | 91 |
| 16 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | 100% | 1005 |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 18 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| Fungsi Organisasi Dan Reformasi Birokrasi | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Indeks Reformasi Birokrasi | 85 | N/A | N/A |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Nilai / Predikat AKIP | 81 | N/A | N/A |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | 94.03 | 100% |
| 4 | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Meningkatnya kewirausahaan baru | Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20) | 100% | 100 | 100% |
| 6 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian Pengurangan Sampah di Sumber (KSD Nomor 26) | 100% | 100 | 100% |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabe | Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | 100% | 100 | 100% |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian Pengembangan Smart City (KSD Nomor 43) | 100% | 100 | 100% |
| 9 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | 100% | 100 | 100% |
| 10 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN (KSD Nomor 62) | 100% | 100 | 100% |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | 100% | 100 | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 12 | Meningkatnya pemanfaatan e-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa | Persentase Pemanfaatan e-Order | 100% | 100 | 100% |
| 13 | Terwujudnya tatakeloa pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan keuangan daerah | 3 | 3 | 100% |
| 14 | Terimplementasinya renana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi Rencana Strategis Komunikasi Publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100% | 100 | 100% |
| 15 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | 81 | 81 | 100% |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 16 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |
| Fungsi Kepala Daerah | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 | 94 % | 102% |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39) | 100 | 100 | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61) | 100 | 100 | 100% |
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 5 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100 | 100% | 100% |
| 6 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100 | 100% | 100% |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan keuangan daerah | 3 | 3 | 100% |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | 91 | 92.74 | 104% |
| 9 | Persentase Pemakaian e-office | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100 | 100 | 100% |
| 10 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100 | 100 | 100% |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 11 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100 | 100% | 100% |
| 12 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100 | 100% | 100% |
| 13 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100 | 100% | 100% |
| Fungsi Umum Dan Administrasi | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan | 4 | 4 | 100% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | 98,42% | 108,15% |
| 3. | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan Integratif Nomor (12) | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 5. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini Laporan Keuangan | (3) WTP | (3) WTP | (3) WTP |
| 6. | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 97,36% | 97,36% |
| 7. | Terimplementasinya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk Program-Program Umum dan Unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA (91) | 93,79 | 103,07% |
| 9. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 | 95 | 96,67 | 100,76% |
| 10. | Peningkatan Penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Peningkatan Penggunaan e-Produk Hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 12. | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 13. | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |
| Fungsi Perekonomian Dan Keuangan | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Skor EKPPD | 3,3 | 3,3 | 100% |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | 91% | 100% |
| 4 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (KSD 71) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta (KSD 70) | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD 39) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD 61) | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 7 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan Keuangan | 3 (WTP) | 3 (WTP) | 100% |
| 9 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA (91) | AA (91) | 100% |
| 12 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 14 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |
| Fungsi Kerja Sama Daerah | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasiskan data | Skor EKPPD | 3,3 | N/A | N/A |
| 2 | Meningkatnya kerja sama/kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pihak | Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | 98,04% | 108% |
| 4 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal Nomor (22) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembngunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23) | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Meningkatnya kewirausahaan baru | Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20) | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terwujudnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71) | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58) | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15) | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 10 | Terlaksananya kolaborasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Jumlah kolaborator | 550 | 1008 | 183,27% |
| 11 | Terlaksananya JDCN Forum 2022 | Jumlah Audience JDCN Forum 2022 | 5 juta | 5.792.642 | 116% |
| 12 | Terbitnya Rancangan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan Kerjasama di Pemprov DKI Jakarta dengan didukung terbitnya SOP Kerjasama | Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan kerjasama | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tersedianya platform kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi | Produk Hukum Platform Kolaborasi terbit | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Pembangunan Platform Kolaborasi | 100% | 100% | 100% |
| | | Jumlah program kolaborasi baru di platform kolaborasi (Jakarta Development Collaboration Network) | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan keuangan | (3) WTP | (3) WTP | 100% |
| 15 | Meningkatnya pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Presentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 16 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |
| Fungsi Pembangunan Dan Lingkungan Hidup | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2,00 | 3 | 100% |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | 3,30 | N/A | N/A |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 | 90,87 | 99,86% |
| 4 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi Nomor (53) | | | |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58) | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta Nomor (70) | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Nomor (28) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45) | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73) | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nomor (41) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 10 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100 | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan Keuangan | (3) WTP | (3) WTP | 100% |
| 12 | Meningkatnya Pemanfaatan E- Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA (91) | AA (91) | 100% |
| 15 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e- perbal | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 17 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |
| Fungsi Kesejahteraan Sosial | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan. | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | 2 | 100% |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntable | Skor EKPPD | 3,30 | N/A | N/A |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | 92% | 101,09% |
| 4 | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian rencana aksi pengentasan kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Nomor (11) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase peyelesaian rencana aksi Penyedian Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan integratif Nomor (12) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak | Persentase penyelesaian rencana aksi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Nomor (13) | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Terwujudnya Jakarta sebagai Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing Internasional | Presentasi Penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Destinasi DKI Jakarta Nomor (70) | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian rencana aksi peningkatan Aksesibilitas penyandang DisabilitasNomor (14) | 100% | 100% | 100% |
| | | Presentase Penyelesaian rencana aksi pembangunan Stadion Olahraga bertaraf Internasional Nomor (10) | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntable | Persentase penyelesaian rencna aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 9 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini Laporan Keuagan | 3 (WTP) | 3 (WTP) | 100% |
| 11 | Meningkatnya Pemanfaatan E- Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Terimplementasinya Rencana Strategi Komunikasi Publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Presentasi Implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | AA(91) | 91% | 100% |
| 14 | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah | Jumlah Paket Pengadaan Barang / Jasa Melalui Swakelola tipe III/IV | N/A | N/A | 100% |
| 15 | Peningkatan Penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Peningkatan penggunaan e-Produk Hukum | Jumlah Perbal / Produk Hukum yang di buat melalui sistem e-perbal | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 17 | Terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur | Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |
| Fungsi Pendidikan Dan Mental Spiritual | | | | | |
| *Sasaran Strategis* | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | 3,3 | N/A | N/A |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 | 90.37 | 99.30% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan | Indeks Kualitas Kebijakan | 2 | | |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (nomor 1) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Sekilah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi (nomor 3) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan (nomor 5) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) (nomor 6) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD (nomor 8) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (nomor 12) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Sekolah Kolaborasi (nomor 37) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Bemar Membaca (nomor 69) | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14) | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitaslisasi Taman Ismail Marzuki (nomor 19) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta (KSD Nomor 70) | 100% | 100% | 100% |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana akasi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah (nomor 61) | 100% | 100% | 100% |
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 8 | Tercapainya sasaran khusus | Persentase capaian rata-rata sasaran khusus | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Opini laporan Keuangan | 3 | 3 | 100% |
| 10 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi | Jumlah kolaborator Jakarta | 20 | | |
| 12 | Terwujudnya kepuasan Layanan mental spiritual | Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan mental spritual | 85 | | |
| 13 | Terselesaikannya dan terpublikasikannya penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/ keagamaan dan tempat ibadah di Provinsi DKI Jakarta | Jumlah organisasi kemasyarakatan /keagamaan dan tempat ibadah penerima belanja hibah | 4 | 4 | 100% |
| 14 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | 91 | | |
| 16 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal | 100% | | |
| 17 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi | 100% | | |

| NO | SASARAN INDIKATOR | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| *Sasaran Operasional* | | | | | |
| 18 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 100% | 100% |

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dapat digunakan sebagai informasi yang transparan mengenai sebab tercapai maupun tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis dan 60 (enam puluh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun narasi pada masing-masing Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang terdiri dari Biro biro adalah sebagai berikut :

## 1. REALISASI CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 :

**Tabel III.2**
**Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fungsi Pemerintahan | | | | | |
| 1 | Skor EKPPD | Nilai | 3,300 | N/A | N/A |
| Fungsi Hukum | | | | | |
| 1 | Persentase OPD yang telah melakukan 8 area perubahan reformasi birokrasi berdasarkan hasil pengukuran capaian reformasi birokrasi | % | 71,43 | 74% | 103,59% |
| 2 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | % | 91 | 89,08% | 97,89% |
| 3 | Nilai Komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai/Skor | 3,2 | 4 | 110% |
| Fungsi Organisasi Dan Reformasi Birokrasi | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel | % | 85 | 80,10 | 94,23% |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 12 | 11,98 | 99,83% |
| Fungsi Kepala Daerah | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap Pelayanan Administrasi Umm dan Kerumahtangaan Komplek Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan | Nilai 1-4 | 3,72 | 4 | 100% |
| Fungsi Umum Dan Administrasi | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan | Nilai 1-4 | 3,75 | 4 | 100% |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fungsi Perekonomian Dan Keuangan | | | | | |
| 1 | Jumlah Ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Kasus | 0 | 0 | 100% |
| 2 | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Kasus | 0 | 0 | 100% |
| 3 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | Indeks | 4 | 4 | 100% |
| Fungsi Kerja Sama Daerah | | | | | |
| 1 | Skor EKPPD | Skor | 3,3 | N/A | N/A |
| 2. | Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 91% | 98,04% | 108% |
| Fungsi Pembangunan Dan Lingkungan Hidup | | | | | |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | 3,3 | N/A | N/A |
| Fungsi Kesejahteraan Sosial | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 91 | N/A | N/A |
| 2 | Skor EKPPD | Nilai | 3.30 | N/A | N/A |
| 3 | Persentase kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persen | 91 | 92 | 101,01% |
| 4 | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | 2 | 2 | 100% |
| Fungsi Pendidikan Dan Mental Spiritual | | | | | |
| 1 | Skor EKPPD | Nilai | 3,3 | N/A | N/A |
| 2 | Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 91 | 90.37 | 99.30% |
| 3 | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | 2 | | |

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan realisasi masing-masing IKU, terdiri dari~~:~~

a. Biro Pemerintahan

Skor EKPPD, indikator ini mempunyai 1 (satu) target yang harus dicapai, yaitu : 3.300, yang merupakan Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah; 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang; 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi; 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi, sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia. (data dukung capaian terlampir) dimana

mulai di tahun 2020 terdapat perubahan perhitungan pemeringkatan dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah; 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah; 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang; 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi; 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi, Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia

Kementerian Dalam Negeri sudah dua tahun ini belum mengeluarkan Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional, dimana Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri hanya mengeluarkan berbentuk piagam dan tahun 2021 ini Kementerian Dalam Negeri belum sama sekali, dimana informasi yang didapat adalah Kementerian Dalam Negeri masih menunggu hasil rekomendasi dan penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai yang telah diamanatkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 pasal 27 (3), dan kemungkinan untuk di Tahun 2022 mengalami hal yang sama.

Untuk mencapai target indikator tersebut Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 10 (sepuluh) subkegiatan operasional dimana dibagi habis dan diturunkan kedalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro Pemerintahan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan.

Secara umum keberhasilan pencapaian target indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

1) Pelaporan SPM telah berbasis WEB

2) Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi
3) Anggaran yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi
4) Kegiatan Strategis Daerah mendukung capain Program Daerah
5) Terdapat regulasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi
6) Peningkatan kualitas TL aduan PD/UKPD karena adanya proses verifikasi dan validasi hasil TL melalui pengecekan lapangan oleh TA Facilitator
7) Pelaksanaan fasilitasi pembahasan pengaduan masyarakat dengan pihak terkait.

Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya :

1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

**Tabel III.3**
**Perbandingan Realisasi Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya**

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI 2022 | REALISASI 2021 | REALISASI 2020 | REALISASI 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Persentase penyelesaian masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 90 % | 90 % | 85 % | - | - |

Program ini menunjang tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program dan kegiatan, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam kegiatan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

**Tabel III.4**
**Perbandingan Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya**

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersusunnya Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Persentase penyelesaian kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 90 % | 90% | 85 % | - | - |

Kegiatan ini menunjang tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program dan kegiatan, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam subkegiatan sebagai berikut :

Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, dengan memiliki target sebagai berikut :

i) Persentase Draft Kebijakan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, dimana dalam target ini terdapat rincian sebagai berikut :

(1) Pembinaan Aparatur Wilayah terdiri dari : 267 Kelurahan, 44 Kecamatan, 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten terkait dengan Pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi Aparatur Kewilayahan (Direncanakan dilakukan tiap Triwulan)

(2) Persentase Penyelesaian :

15 (Lima Belas) Kebijakan hasil rapat atas disposisi pimpinan dan penyelesaian terkait Permasalahan Pembinaan Kewilayahan atau Jumlah Kajian :

1 (satu) Kajian sesuai dengan Tugas dan Fungsi (Kajian analisis ttg distribusi ulang jml ppsu, uang makan dan piket ppsu serta sinkronisasi PPSU dengan PJLP taman dan Kajian sesuai dengan Isu2 strategis yang berkembang)

(3) 1. Kajian analisis tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi para Ketua RT/RW, 2. Kajian untuk Revisi Pergub Pedoman RT, RW, LMK, dan Dewan Kota

(4) Persentase Penyelesaian : : 16 Kebijakan hasil rapat atas disposisi pimpinan dan penyelesaian terkait Penataan dan Pengembangan Wilayah atau Kajian sesuai dengan Tugas dan Fungsi (Kajian sesuai dengan Isu2 strategis yang berkembang)

(5) Penyelesaian Permasalahan Subbag Tata Praja : Persentase Penyelesaian :1. Monev KSD (Maret B-03; Juni B-06; September B-09 dan Desember B-12), 2. Monev Anggaran + Penyerapan + Fisik tanggal 20 Setiap Bulan Berjalan (12 Bulan Januari-Desember), 3. Capaian Rata2 Sasaran Khusus Pada KPI Eselon 2 (12 Bulan Januari-Desember), dengan diampu oleh 3 (tiga) subkoor dilingkungan koordinator Tata Praja dan Pemerintahan Umum

(6) Persentase Penyelesaian :

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi (Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Penerima Dana Dekonsentrasi), dimana Kepala Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kapasitas Daerah menjadi penanggung jawab dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun 2019

(7) 2 (dua) Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Biro Pemerintahan menjadi pemberi rekomendasi i-otda dan APPSI

(8) Persentase Penyelesaian :

22 Kebijakan hasil rapat atas disposisi pimpinan dan penyelesaian terkait Permasalahan Penataan dan Pengembangan Wilayah atau Kajian sesuai dengan Tugas dan

Fungsi Penataan dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan Pera

ii) Persentase batas kelurahan yang teridentifikasi

Biro Pemerintahan pada tahun 2022 ini memiliki target 31 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara, 65 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, 65 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, 56 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Target 2020)

Pusat (2019)

Merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.32/5150/SJ tanggal 25 Juli 2018 Tentang Kebijakan Prioritas Bidang Pembakuan Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2019, dimana didalamnya disampaikan program dan kegiatan prioritas provinsi yang perlu didukung didalam APBD TA 2019 :

(1) Program Pembakuan Nama Rupabumi dan

(2) Program Penegasan Batas Daerah

Dengan adanya Program pada Poin 2 diatas maka Biro Pemerintahan melakukan Penegasan Batas Daerah dengan Lingkup terkecil Kelurahan dengan tiap Tahunnya memiliki target, sehingga diakhir 2022 diharapkan dengan selesainya penegasan batas kelurahan maka akan berdampak juga dengan penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota sekitar

iii) Persentase Draft Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan, dimana dalam target ini terdapat rincian sebagai berikut :

perhitungan (jumlah draft kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan / bahan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan) x 100

Kategori draft kebijakan :

(1) Draft Produk Hukum

(2) Draft Kebijakan yang akan dilakukan pembahasan

Kategori Bahan Kebijakan :

Aduan Masyarakat (yang masuk melalui Aplikasi CRM atau secara langsung melalui disposisi pimpinan) yang perlu dilakukan tindak lanjut berupa sebuah kebijakan, dengan rincian Tersusunnya Kebijakan atau Kajian terkait Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan, dimana rincian target kinerja yang dimiliki adalah Biro Pemerintahan melakukan pembahasan terkait permasalahan Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan dimana output yang diharapkan berupa kebijakan, dimana permasalahannya berdasarkan disposisi dan isu-isu strategis yang berkembang, Tersusunnya Kebijakan atau Kajian terkait Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dimana rincian target kinerja yang dimiliki adalah Biro Pemerintahan melakukan pembahasan terkait permasalahan Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dimana output yang diharapkan berupa kebijakan, dimana permasalahannya berdasarkan disposisi dan isu-isu strategis yang berkembang dan Tersusunnya Kebijakan atau Kajian terkait Penanganan Pengaduan Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, dimana rincian target kinerja yang dimiliki adalah Biro Pemerintahan melakukan pembahasan terkait permasalahan Penanganan Pengaduan Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan dimana output yang diharapkan berupa kebijakan, dimana permasalahannya berdasarkan disposisi dan isu-isu strategis yang berkembang

iv) Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, dimana dalam target ini terdapat rincian sebagai berikut :

(1) Tersusunnya Kebijakan atau Kajian terkait Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan, dimana rincian target kinerja yang dimiliki adalah Biro Pemerintahan melakukan pembahasan terkait permasalahan Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan dimana output yang diharapkan berupa kebijakan, dimana permasalahannya berdasarkan disposisi dan isu-isu strategis yang berkembang

(2) Tersusunnya Kebijakan di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan, menunjang tugas sesuai Pergub 150 tahun 2019 yaitu Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun kebijakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan tugas lainnya yang diatur dalam Pergub 150 Tahun 2019, dimana rincian target kinerja adalah Penguatan Tata Kelola CRM : Pelaksanaan sosialisasi terkait kanal-kanal pengaduan masyarakat (4 Kali- Tiap Triwulan)-Laporan; Laporan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta publikasi materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan - 4 Laporan; terlaksananya laporan pengaduan masyarakat Pemerintahan dan Kesra dan Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan (Setiap Triwulan)- 8 Laporan.

b) Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

**Tabel III.5**
**Perbandingan realisasi Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya**

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersusunnya kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentase penyelesaian kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah | 90 % | 90 % | 85 % | - | - |

i) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, dengan memiliki target sebagai berikut :

Tersusunnya Kebijakan terkait Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan menunjang tugas sesuai Pergub 150 tahun 2019 yaitu Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun kebijakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas PD Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun kebijakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas PD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, sinkronisasi urusan pemerintahan, norma, standar dan prosedur kerja urusan pemerintahan, dan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan tugas lainnya yang diatur dalam Pergub 150 Tahun 2019, dimana rincian target kinerja yang dimiliki adalah 1 Laporan Kebijakan Penerapan SPM dan 1 Draft RUU

ii) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memiliki target sebagai berikut :

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta, menunjang tugas sesuai Pergub 150 tahun 2019 melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pelaksanaan tugas lainnya yang diatur dalam Pergub 150 Tahun 2019, dimana memiliki target kegiatan Persentase penyelesaian kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan turunan subkegiatan Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dimana rincian target kinerja yang dimiliki adalah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**Tabel III.6**
**Perbandingan realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Pemerintahan dengan tahun sebelumnya**

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 | 4 | 4 | - | - |

Program ini menunjang tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun

2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program dan kegiatan, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam kegiatan sebagai berikut :

i) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat diinformasikan bahwa kegiatan ini dipakai untuk biaya transfer dan pembelian buku cek, dikarenakan terdapat kebijakan bebas biaya transfer dan terdapat stock buku cek, maka mengalami perubahan anggaran yang awalnya memiliki anggaran Rp 647.000 dihilangkan menjadi Rp 0, pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam subkegiatan sebagai berikut:
   (1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

ii) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam subkegiatan sebagai berikut:
   (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   (2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   (3) Fasilitasi Kunjungan Tamu

iii) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam subkegiatan sebagai berikut:
   (1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   (2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam subkegiatan sebagai berikut:
      (a) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

iv) Fasilitasi Keprotokolan, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam subkegiatan sebagai berikut:

(1) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

Pada tahun 2022 terkait dengan realisasi, telah dilaksanakan survei dengan melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Pegawai Biro Pemerintahan terhadap layanan Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pemerintahan secara Kuesioner elektronik (e-survei), dengan menggunakan google form dimana linknya adalah https://bit.ly/SurveiKepuasanTU dan melibatkan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Capaian IKU Penunjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja (Sasaran Khusus dan Operasional)

**Tabel III.7**
**Penjelasan atas Capaian IKU Penunjang pada Biro Pemerintahan**

| No | Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|---|
| *Sasaran Khusus* | | | | | |
| 1 | Menyelesaikan penegasan batas wilayah sesuai SE Kemendagri Nomor 903 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Prioritas | persen | 100 | 100 | Target Kelurahan :<br>1. 2019 : 44 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat<br>2. 2021 : 65 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 65 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur (130 Kelurahan)<br>3. 2022 31 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan 56 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat (87 Kelurahan)<br>4. Dimana akhir RPJMD di target kan 261 Kelurahan |
| 2 | Tercapainya sasaran khusus | persen | 100 | 100 | Jumlah Sasaran Khusus yang tercapai untuk Perangkat Daerah dibawah koordinasinya dibagi Jumlah Sasaran Khusus untuk Perangkat Daerah dibawah koordinasinya dikali 100% |
| 3 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif | Predikat | (3) WTP | (3) WTP | Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap |

| No | Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)) |
| 4 | Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persen | 100 | 100 | Formula Pengukuran :<br>Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order<br><br>Sumber Data :<br>Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.) |
| 5 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.<br>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun editorial plan lingkup Provinsi.<br>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.<br>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.<br><br>Penghitungan:<br>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan.<br>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.<br>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. |

| No | Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan. |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat | AA (91) | AA (91) | Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91) |
| 7 | Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan | Persen | 100 | 100 | Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut. |
| 8 | Peningkatan penggunaan e-Produk hukum | Persen | 100 | 100 | Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD. |

**b. Biro Hukum**

Capaian realisasi masing-masing IKU pada Biro Hukum, terdiri dari :

1) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada Biro Hukum mencapai realisasi anggaran dengan efesiensi dari pengadaan

barang/jasa dan anggaran transpor sidang serta biaya penanganan perkara yang diserap sesuai dengan kebutuhan sebesar Rp. 3.086.858.381 dari total anggaran Rp. 3.415.278.60599 % dengan sebesar 90,38 % dari target 91 %. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong capaian realisasi, antara lain dikarenakan :

a) Peningkatan SDM dengan adanya jabatan fungsional Perancang perundangundangan dan Analis Hukum serta penambahan jumlah PNS
b) Digitalisasi dalam penyusunan Produk Hukum Daerah (pergub) melalui e-produk hukum dan pendataan litigasi dan nonlitigasi melalui e perkara serta peningkatan pelayanan JDIH
c) Peningkatan penangan perkara asset yang dimenangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung pengolahan data asset yang lebih baik
d) Peningkatan pelaksanaan Pembinaan Kadarkum dan penyuluhan hukum yang dilakukan secara Hybrid serta pelayanan berbasis HAM dipemerintah Provinsi DKI Jakarta
e) Perencanaan Ranpergub dan Ranperda melalui Prompergub dan Promperda serta Simplifikasi dan Omnibuslaw dalam Penataan Peraturan perundang-undangan.

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

a) Program Fasilitasi dan Kooordinasi Hukum
   i) Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
   ii) Fasilitasi Bantuan Hukum
   iii) Peningkataan Penyelenggaran Kota Administrasi
b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   i) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   ii) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   iii) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
c) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   i) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

2) Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi.

Rencana aksi Biro Hukum dalam penataan perundang-undangan berupa penyederhanaan regulasi dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi yang mendorong regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penataan dilakukan dengan adanya Kegiatan strategis daerah deregulasi/penataan produk hukum daerah. Target pencapaian indeks nilai komponen peraturan perundang-undangan tahun 2022 dengan penilaian mandiri sebesar nilai indeks 5 dan terealisasi indeks nilai 5.

Pencapaian target Penataan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator program adalah presentase regulasi yang harmonis dan tahun 2022 tercapai 100 % dikarenkaan tidak adanya pengajuan /Keputusan Pengadilan yang membatalkan produk hukum daerah. Pelaksanaan penataan peraturan perundangan undangan di pemerintah provinsi DKI Jakarta tergambar sebagai berikut :

a) kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah melalui Sub kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 296.500.000 dan penyerapan sebesar Rp 254.900.000 atau sebesar 94,6%. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, proses pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan sistem informasi e produk hukum dan menetapkan Prompergub tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut :
   i) Program Pembentukan Peraturan Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 167 Tahun 2022 dengan jumlah usulan Peraturan Gubernur sebanyak 250 usulan dari 37 Perangkat Daerah/Unit Kerja pada perangkat daerah. Telah diproses melalui e produk hukum sebanyak 114 usulan rapergub (45,6%) dan telah diundangkan sebanyak 66 Peraturan Gubernur (26,4%)
   ii) Pelaksanaan fasilitasi Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020.

iii) Penerapan simplifikasi dan Omnibus Law atas produk hukum daerah yang diundangkan tahun 2022 seperti Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

b) Selain itu pelaksanan sub kegiatan Persentase Produk Hukum yang dibukukan dalam Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) pendukung kegiatan harmonisasi dan produk hukum daerah. Tahun 2022 ini tercapai pencetakan peraturan gubernur sejumlah 115 Peraturan gubernnur dan pendistribusian kepada perangkat daerah sebagai upaya publikasi , pelayanana terhadap masyarakat atas produk hukum daerah guna peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

**c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi**

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun program Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi memiliki 2 (dua) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dimana dibagi habis dan diturunkan kedalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan.

Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

1) Program Penataan Organisasi

**Tabel III.8**
**Perbandingan realisasi Program Penataan Organisasi**

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Program Penataan Organisasi | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja | 84 | 84 | 100 | 100 |
| | Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 12 | 11,98 | 15 | N/A |
| | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik | 46,7 | 46,7 | 100 | 100 |
| | Nilai PMPRB | 92 | 91,57 | 97 | 96,67 |

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian indikator program pada tahun 2021 dan 2022 secara umum realisasinya sudah mendekati target yang telah ditentukan.

Program Penataan Organisasi terdiri dari :

a) Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi melaksanakan penataan Kelembagaan melalui monitoring dan evaluasi serta penghitungan beban kerja Perangkat Daerah sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Melakukan penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

b) Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan ini mempunyai 4 (empat) sub kegiatan. Sub kegiatan yang mendukung capaian indikator indeks reformasi birokrasi yaitu Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**Tabel III.9**
**Perbandingan realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Organisas dan Reformsi Birokrasi dengan tahun sebelumnya**

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 | - | - | 4 | 4 |

Program ini menunjang tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program dan kegiatan, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam kegiatan sebagai berikut :

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD/Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan) adalah tersediannya prasarana administrasi keuangan berupa materai dan buku cek, untuk menunjang kegiatan-kegiatan administrasi keuangan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan pagu anggaran Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) Total realisasi anggaran kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Benda Pos (Materai) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp. 310.000,-(tiga ratus

sepuluh ribu rupiah) atau 99.68% sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Fasilitasi Kunjungan Tamu (Penyediaan Makanan dan Minuman)

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Fasilitasi Kunjungan Tamu/Penyediaan Makanan dan Minuman) adalah tersedianya/terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan pagu anggaran Rp. 9.554.160,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu serratus enam puluh rupiah) total realisasi realisasi anggaran sebesar Rp. 4.170.100,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) atau 43,65% dari total pagu anggaran Rp. 9.554.160,- (sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga tedapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.384.060,- (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah)

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Alat Tulis Kantor)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Penyediaan Alat Tulis Kantor) adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, dengan pagu anggaran Rp 47.117.147,- (Empat puluh tujuh juta serratus tujuh belas ribu sertaus empat puluh tujuh rupiah) total realisasi anggaran kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan ATK) Biro Organisasi dan Reformasi Birkrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 47.002.450,- (empat puluh tujuh juta dua ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dari nilai tersebut terdapat efisiensi anggaran dalamkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan ATK) BiroOrganisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggara 2021sebesar Rp. 114.697,- (seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh

rupiah). Efisiensi anggaran terjadi karena adanya negosiasi harga satuan

d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy) adalah untuk memenuhi kebutuhan/ketersediaan mesin foto copy, sehingga dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dengan cara penunjukan langsung selama 12 (dua belas) bulan, yakni bulan Januari s.d. Desember 2021 dengan pagu anggaran Rp. 74.923.200,- (Tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) total realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor/Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 51.955.200,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau 69,34% dari total pagu anggaransebesar Rp 74.923.200,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribudua ratus rupiah), sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 22.968.000,- (dua puluh duajuta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2021 dan 2022 terinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel III.10**
**Realisasi pagu anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi**

| No | Pagu anggaran | | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| | 477.205.507 | | 448.737.750 (94,03) | |
| | | 1.249.094.091 | | 1.216.920.770 (97,42%) |

- Faktor pendorong dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada

tahun anggaran 2021 dan 2022 didukung oleh anggaran yang memadai dan koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran terkait.

- Faktor Penghambat adanya refocusing anggaran sehubungan dengan pandemi covid-19 sehingga anggaran yang sudah di alokasikan untuk narasumber dan operasional tidak dapat direalisasikan dengan maksimal.

**d. Biro Kepala Daerah**

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing iku, terdiri dari :

1) Capaian IKU Indeks Kepuasan pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah.

   Adapun beberapa analisis capaian Perjanjian kinerja Biro Kepala Daerah yang dijabarkan sebagai berikut :

   a) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

      Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dalam meningkatkan Pelayanan kepada Pimpinan Daerah. Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan sangat berpengaruh terhadap mutu kinerja dalam memberikan pelayanan. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran).

      Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja perlu melakukan analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Secara Umum memberi tanggung jawab kinerja kepada Bagian yang berhubungan dengan target pencapaian kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana pada akhir tahun anggaran setiap Subbagian membuat Laporan Kinerja. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Biro Kepala Daerah melaksanakan kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif

terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan.

Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan Sumber Dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber dana. Selain itu Biro Kepala Daerah telah menggunakan sistem digitalisasi dalam setiap proses kegiatan dengan seiring dengan peningkatan era digitalisasi.

Adapun faktor pendorong yang menyebabkan realisasi IKU dapat tercapai sesuai target, diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga mampu menyelesaikan program dan kegiatan secara maksimal.
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
3. Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro KDH mengerti betul harus saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.
5. Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanan pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

**e. Biro Umum dan Administrasi**

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas merupakan Indikator Kinerja Utama Biro Umum dengan target 3,75 dan realisasi 4, sehingga capaiannya sebesar 100%. Hal yang menjadi pendorong keberhasilan kinerja diantaranya karena adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dan UKPD dalam pelaksanaan tugas, serta sumber daya manusia yang andal dalam pengimplementasian pekerjaan

Adapun program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut, adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

**Tabel III.11**
**Realisasi Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada Biro Umum dan Administrasi**

| Program | Indikator Program | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan | 3,75 | 4 | 100% |

Kegiatan yang mendukung capaian indikator program tersebut adalah:

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
g) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
h) Fasilitasi Keprotokolan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua indikator kinerja pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah tahun 2022 telah sesuai target dengan capaian 4 atau 100% hal ini dikarenakan :

a. Sistem perencanaan yang semakin baik dengan memperhatikan arah, kebijakan serta prioritas anggaran.
b. Pelaksanaan anggaran tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.
c. Adanya komitmen dari pengguna anggaran untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.
d. Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pengguna anggaran, pemangku kepentingan serta stakeholders terkait.

**f. Biro Perekonomian dan Keuangan**

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari :

1) Capaian IKU 1 (Jumlah Ketidaksesuaian antara Peraturan dengan Pelaksanaan

   Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Ketidaksesuaian antara Peraturan dengan Pelaksanaan dengan target ditahun 2022 yaitu 0 (nol) kasus, dan realisasi yaitu nol kasus sehingga memenuhi capaian maksimal yaitu sebesar 100%.

   Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya :

   a) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, yaitu program yang terkait dengan capaian IKU Jumlah Ketidaksesuaian antara Peraturan dengan Pelaksanaan. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, yang terdiri dari 14 Aktivitas Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

      i) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah
      ii) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Daerah
      iii) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
      iv) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelautan dan Perikanan
      v) Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran pada SKPD Bidang Perekonomian dan Keuangan
      vi) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ekonomi Daerah
      vii) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan
      viii) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
      ix) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP
      x) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perdagangan dan Perindustrian
      xi) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

xii) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

xiii) Peningkatan Pemahaman atas Pembuatan Izin Usaha Mikro Usaha Kecil

xiv) Peningkatan Kapasitas Usaha Laik Ekspor

Masing-masing PASK memiliki target capaian (output) yaitu 1 Laporan berupa Hasil Pembahasan Isu-Isu Strategis pada masing-masing Sub Bagian, dan tingkat ketercapaian pemenuhan target sudah mencapai 100% dan laporan sudah diupload pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan berbasis elektronik (e-SAKIP).

2) Capaian IKU 2 (Jumlah Ketidaksesuaian antara Kebijakan dengan Peraturan)

Target Indikator Kinerja Utama Jumlah Ketidaksesuaian antara Kebijakan dengan Peraturan dengan target ditahun 2022 yaitu 0 (nol) kasus, dan realisasi di tahun 2022 yaitu sebanyak 0 (nol) kasus sehingga memenuhi capaian maksimal yaitu sebesar 100%.

Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

a) Program Perekonomian dan Pembangunan, yaitu program yang terkait dengan capaian IKU Jumlah Ketidaksesuaian antara Kebijakan dengan Peraturan. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dengan target capaian untuk tahun 2022 yaitu 2 (dua) Laporan/Kajian, dan realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan sehingga persentase capaiannya adalah 100 (seratus) persen.

3) Capaian IKU 3 (Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor)

Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dengan target ditahun 2022 yaitu nilai indeks sebesar 4 (empat), dan realisasi capaian yaitu indeks 4 (empat), sehingga memenuhi capaian maksimal yaitu sebesar 100%.

Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya target IKU diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala pada proses pembentukan kebijakan dan peraturan pada Program/Kegiatan yang diampu oleh Biro Perekonomian dan Keuangan, sehingga perbandingan antara kebijakan dengan peraturan seluruhnya telah sesuai (ketidaksesuaian = 0 kasus).
2) Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan suatu kebijakan pada Program/Kegiatan yang diampu oleh Biro Perekonomian dan Keuangan, sehingga perbandingan antara peraturan dengan pelaksanaan seluruhnya telah sesuai (ketidaksesuaian = 0 kasus)

**g. Biro Kerja Sama Daerah**

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing iku, terdiri dari :

1) Capaian IKU 1 (Skor EKPPD)

   Target Indikator Kinerja Utama Skor EKPPD dengan target ditahun 2022 yaitu 3.3, dimana sampai dengan saat ini Kemendagri belum mengeluarkan Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional, sehingga capaian atas indikator Kinerja Utama belum dapat dinilai capaiannya.
2) Capaian IKU 2 **(**Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi**)**

   Target Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi dengan target di tahun 2022 yaitu nilai 100%, dan realisasi capaian yaitu 100%, sehingga memenuhi capaian maksimal yaitu sebesar 100%.

   Pada tahun 2022, Program Penunjang Capaian Persentase Kerjasama yang Terfasilitasi yaitu

   a) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

      Program tersebut memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas, Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang terfasilitasi, Persentase Kerjasama yang difasilitasi dan berhasil. Adapun realisasi tahun anggaran 2022 adalah sebesar Indeks 4.
   b) Program Penataan Organisasi

Program tersebut memiliki indikator kinerja adalah Persentase Kerjasama Luar Negeri yang terfasilitasi dan berhasil. Adapun realisasi tahun anggaran 2022 adalah sebesar 100%.

3) Capaian IKU 3 **(**Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**)**

Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target ditahun 2022 yaitu 91%, dan realisasi capaian yaitu 98,04%, sehingga melebihi capaian maksimal yaitu sebesar 108%. Pada tahun 2022, Program Penunjang Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki Indikator kinerja program adalah "Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor" yang memiliki capaian realisasi sebesar 100%.

Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya target IKU adalah sebagaimana berikut :

1. Terjalinnya Kerjasama yang baik dengan mitra kerja dan OPD terkait serta terselenggaranya kegiatan sesuai dengan usulan kerja sama.
2. Terpenuhinya dan tersedianya penunjang urusan kantor dengan baik karena adanya sumber daya manusia yang kompeten dan kegiatan yang dilakukan sesuai SOP yang berlaku

**h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing iku, terdiri dari :

1) Capaian IKU

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis dengan indikator Skor EKPPD juga belum dapat disampaikan capaiannya disebabkan penilaian SKOR EKPPD dari Kementerian Dalam Negeri belum tersedia. Hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 atas penilaian capaian kinerja daerah tahun 2020.

**i. Biro Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing iku, terdiri dari :

1) Capaian IKU 1 yaitu :

a.1. IKU 1 adalah IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi hingga saat ini belum diterbitkan, sehingga untuk capaian belum dapat disajikan.

Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

a) Program Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan/KSD yang mendukung capaian program tersebut yaitu :

i) Pelaporan, Monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini merupakan Rencana Aksi dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 4 Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun jumlah renaksi KSD tahun 2022 sebanyak 136 Renaksi di 6 KSD. rencana aksi 135 renaksi mencapai nilai 100% dan 1 renaksi mencapai nilai 80%

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tahun 2022 meliputi :

- KSD 10 Pembangunan Stadion Olahraga bertaraf Internasional (18 Renaksi)
- KSD 11 Peningkatan Kejehateraan Lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) (5 Renaksi)

- KSD 12 Peyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan Integratif (61 renaksi)
- KSD 13 Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (19 Renaksi)
- KSD 14 Peningkatan Aksesibiltas Penyandang Disabilitas (27 Renaksi)
- KSD 42 Pengentasan Kemiskinan melalui Integrasi Bantuan Sosial (6 Renaksi)

2) Capaian IKU 2 :

Capaian IKU 2 pada Skor EKPPD

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Skor EKPPD hingga saat ini belum diterbitkan, sehingga untuk capaian belum dapat disajikan.

3) Capaian IKU 3 :

Pogram yang menunjang IKU ini adalah kegiatan operasional penunjang kantor dengan hasil capaian seluruhnya nilai 4 tingkat kepuasan layanan tersebut, yaitu :

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4) Capaian IKU 4 :

Program yang mendukung capaian IKU 4 adalah pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan target indeks kualitas kebijakan (2) dan capaiannya di rentang nilai 60,00 -70,99 (sedang) yaitu indeks 2

Secara umum faktor yang menjadi pendorong tercapainya target IKU adalah karena adanya komitmen dari seluruh pegawai serta karena adanya kerjasama dan kolaborasi untuk mencapai IKU sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual**

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari :

1) Indikator Kinerja Skor EKPPD

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional . Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan dukungan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya :

a) Program Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan/KSD yang mendukung capaian program ini yaitu :

i. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini merupakan Rencana Aksi dengan penanggung jawab Biro Dikmental pada KSD :

- Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)
- Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi
- Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan
- Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
- Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD
- Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
- Sekolah Kolaborasi
- Peningkatan Gemar Membaca

ii. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan diluar program JKN bagi tokoh agama pada KSD Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif.

iii. Tersedianya data rumah ibadah yang mudah diakses dan ramah bagi penyandang disabilitas pada KSD Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

iv. Tersusunnya dokumen hasil evaluasi renja dan dokumen kinerja Perangkat Daerah pada KSD Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA

v. Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d 2022 pada KSD Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan

vi. Penyelenggaraan festival keagamaan di DKI Jakarta dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi pemulihan pariwisata pasca pandemic covid 19 bidang pendidikan dan mental spiritual pada KSD Pengembangan Kawasan Wisata/ Destinasi DKI Jakarta

vii. Kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual

viii. Kegiatan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar

ix. Kegiatan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar

b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah :

Terwujudnya fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan perumusan kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dan mental spiritual

Biro Dikmental dapat menyelesaikan capaian kegiatan/renaksi KSD pada program kesejahtaraan rakyat dan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendorong IKU1 sesuai dengan target yaitu dengan capaian 100%.

2) Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Program yang terkait dengan indikator kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Pogram yang menunjang IKU ini adalah kegiatan operasional penunjang kantor, yaitu :

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun capaian nya adalah berupa nilai kepuasa yaitu dengan nilai “4”.

3) Indeks Kualitas Kebijakan

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dan proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi. Tanggung jawab Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta adalah kebijakan di lingkup OPD yang menjadi tanggung jawab koordinasinya. Adapun kebijakan yang dikecualikan adalah kebijakan yang bersifat rutin dan mengatur internal.

Adapun faktor pendorong yang menyebabkan realisasi IKU dapat tercapai sesuai target, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro KDH mengerti betul harus saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.
3. Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanan pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

## 2. PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2022.

**Tabel III.12**
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan tahun sebelumnya**

| NO | IKU | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fungsi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Skor EKPPD | Nilai | 3,100 | 3,150 | 3,200 | 3,250 | 3,300 | 3,105 | 3,1712 | 3,2374 | N/A | N/A |
| Fungsi Hukum | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | | 90 | 100 | 91 | 91 | | | 98 | 89,08 | 90,38 |
| 2 | Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai/Skor | | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2 | | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Fungsi Organisasi Dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | % | 68,00 | 73,00 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 70,92 | 74,57 | 76,54 | 78,88 | N/A |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 88,00 | 88,50 | N/A | 84,41 | 86,34 | 88,44 | 90,37 |
| Fungsi Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah | 1-4 (Skala) | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.95 | 4 | 4 | 4 |
| Fungsi Umum Dan Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan | Skala 1-4 | 3.65 | 3.67 | 3.7 | 3,72 | 3,75 | 3.65 | 3.67 | 3.7 | 4 | 4 |
| Fungsi Perekonomian Dan Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | Indeks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fungsi Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Skor EKPPD | Skor | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | | 3,1045 | 3,1717 | 3,2374 | N/A | |

| NO | IKU | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi | Persentase | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 0 | 0 | 91% | 91% | 91% | 0 | 0 | 14,43% | 91,04% | 108% |
| 1 | Skor EKPPD | Skor | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | | 3,1045 | 3,1717 | 3,2374 | N/A | |
| Fungsi Pembangunan Dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Skor EKPPD | Nilai | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,1045 | 3,1712 | 3,2374 | N/A | N/A |
| Fungsi Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 68 | 73 | 75 | 85 | 91 | | | | | N/A |
| 2 | Skor EKPPD | Nilai | 3,1 | 3,15 | 3,23 | 3,25 | 3.3 | | | | | N/A |
| 3 | Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 93,18 | 87,59 | 98,39 | | 95,96% |
| 4 | Indeks kualitas kebijakan | Indeks | | | | | 2 | | | | | 2 |
| Fungsi Pendidikan Dan Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 68 | 73 | 75 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2. | Skor EKPPD | Nilai | 3,1 | 3,15 | 3,23 | 3,25 | 3.3 | 3,1045 | 3,1712 | 3,2374 | N/A | |
| 3. | Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 97,49 | 98,18 | 90,33 | 91,08 | 90.37 |
| 4. | Persentase penyelesaian perumusan kebijakan lingkup pendidikan dan mental spiritual | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |

Berdasarkan data diatas, dapat dijabarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya÷

**a. Biro Pemerintahan**

1) Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah, 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia

   Perubahan Menjadi :

   Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.

   Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020):

   Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah

   Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah

   Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang

   Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi

   Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi

   Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia. Dimana dasar Keputusan Mendagrinya adalah sebagai berikut :

**Tabel III.13**
**Dasar Keputusan Mendagri atas Realisasi IKU pada Biro Pemerintahan**

| TAHUN | TARGET | REALISASI | DASAR |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3,1000 | 3,1045 | Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 |
| 2019 | 3,1500 | 3,1712 | Kepmendagri Nomor 118-8840 Tahun 2018 |
| 2020 | 3,2000 | 3,2374 | Piagam Penghargaan (Kepmendagri Belum ada) |
| 2021 | 3,2500 | - | Belum diumumkan |
| 2022 | 3,3000 | - | Belum diumumkan |

**b. Biro Hukum**

Capaian Indikator utama pada Biro Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Presentase kualitas pelaksanaan anggaran meningkat di tahun 2022 tercapainya menjadi 90,38 dr target 91 % dibanding dengan tahun 2021 dari 89,08 persen dari target 91% Hal ini dikarenakan peningkatan jenjang jabatan dan adanya biaya penanganan perkara yang merupakan dana simpan yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan perkara yang tidak dapat direncanakan secara pasti.
2) Pencapaian Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada indeks reformasi birokrasi mencapai peningkatan dari tahun 2021 yang semula 4 dari target 3,2. Pada tahun 2022 mencapai peningkatan karena penilaian mandiri mencapai nilai 5 dari target 5 Hal ini didukung dengan adanya deregulasi/penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan pengunaan sistem e produk hukum daerah sebagai sistem informasi dalam penyusunan produk hukum daerah. Serta pelaksanaan simplifikasi dan omnibus law.

**c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi**

Sehubungan dengan beberapa indikator sasaran yang ditetapkan didalam perjanjian kinerja Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi tahun 2021 terdapat beberapa indikator yang tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya sesuai dengan RPJMD tahun 2017-2022 dikarenakan indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2021. Yang merupakan hasil pembahasan penyusunan perubahan Renstra 2017-2022.

Capaian Indikator utama pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi, berdasarkan tabel di atas dari target tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan
b. Nilai/Predikat AKIP dengan rincian sebagai berikut:
    - Tahun 2018 target 80 realisasi 71,04
    - Tahun 2019 target 83 realisasi 73.09
    - Tahun 2020 target 86 realisasi 73.24

- Tahun 2021 target 81 realisasi 80,10
- Tahun 2022 belum keluar nilainya

c. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2018 dan 2019 tidak ditetapkan target dan realisasi, adapun pada tahun 2020 dan 2021 target dan realisasinya sebagai berikut:
   - Tahun 2020 target 91 realisasi 91
   - Tahun 2021 target 91 realisasi 91.

**d. Biro Kepala Daerah**

Capaian IKU Biro Kepala Daerah 2022 sama dengan tahun sebelumnya yakni 4 dari target IKU 2021 sebesar 3.7. Secara umum Biro Kepala Daerah mampu mencapai IKU yang telah ditargetkan mulai dari tahun 2018-2021.

**e. Biro Umum dan Administrasi**

Secara umum Biro Umum dan Administrasi mampu mencapai IKU yang telah ditargetkan mulai dari tahun 2018-2022 sebagaimana pada table diatas, yaitu sebesar 100%.

**f. Biro Perekonomian dan Keuangan**

Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 3 Indikator pada Biro Perekonomian dan Keuangan dapat diperbandingkan dengan realisisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2021.

**Penjelasan** :

1) Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama : **Jumlah Ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan** pada Tahun 2018 – 2022 telah tercapai sesuai dengan angka target pada masing-masing tahun, dengan nilai realisasi yaitu sebesar 0 kasus, capaian ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukannya ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan.
2) Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama : **Jumlah Ketidaksesuaian antara Kebijakan dengan Peraturan pada** Tahun 2018 - 2022 telah tercapai sesuai dengan angka target pada masing-masing tahun, dengan

nilai realisasi yaitu sebesar 0 kasus, capaian ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukannya ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan.

3) Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama : **Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor** pada tahun 2018 - 2022 telah tercapai sesuai dengan angka target pada masing-masing tahun, dengan dengan nilai realisasi yaitu sebesar 4 dengan satuan Indeks, dengan rentang nilai Indeks yaitu dari 1 - 4. capaian realisasi pada tahun 2018 s.d tahun 2021 yaitu nilai Indeks sebesar 4 (empat), hal ini mengindikasikan kepuasan pegawai terhadap pelayanan kantor yang telah dilaksanakan setiap tahunnya.

**g. Biro Kerja Sama Daerah**

Pada tahun 2022, Skor EKPPD dengan target di tahun 2022 yaitu 3.3, dan realisasi di tahun 2022 yaitu N/A sehingga belum memenuhi capaian maksimal yaitu sebesar 3.3. Target capaian Indikator Skor EKPPD adalah sebesar 3,3 tidak dapat tercapai karena penilaian Skor EKPPD atas penilaian kinerja di Tahun 2022 belum diumumkan sehingga realisasi capaian terisi N/A.

Target Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi dengan target di tahun 2022 yaitu nilai 100%, dan realisasi capaian yaitu 100%, sehingga memenuhi capaian maksimal yaitu sebesar 100%.

Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target ditahun 2022 yaitu 91%, dan realisasi capaian yaitu 98,04%, sehingga melebihi capaian maksimal yaitu sebesar 91,04 Pada tahun 2021, Program Penunjang Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki Indikator kinerja program adalah “Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor” yang memiliki realisasi sebesar 100% dari target 100%.

**h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan indikator sasaran Sekretariat Daerah yang realisasinya selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

### i. Biro Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 dan 2 tidak diampuh oleh Biro Kesejahteraan Sosial, hanya supporting data. IKU 3 dan 4 adalah IKU Biro Kesejahteraan Sosial Hasil capaian pada IKU 3 telah melampaui tercapai target. Dan IKU 4 dengan penilaian indeks 2 (sedang).

### j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 dan 2 tidak diampu oleh Biro Dikmental, hanya supporting data. IKU 2 adalah IKU Biro Dikmental. Hasil capaian pada IKU 2 telah melebihi target dengan realisasi penyerapan anggaran di atas 91 persen yaitu sebesar 90.37%. IKU 3 Indeks Kualitas Kebijakan masih menuggu hasil koordinasi dengan Biro Hukum

## 3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran tahun 2022 pada tabel dibawah

**Tabel III.14**
**Data efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | CAPAIAN KINERJA % | PENYERAPAN ANGGARAN % | TINGKAT EFISIENSI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Fungsi Pemerintahan | | | | | |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | N/A | 96,78% | 3,22% |
| Fungsi Hukum | | | | | |
| **1** | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 99 % | 90,38 % | 8% |
| | | Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi | 100 % | 94,6 % | 5% |
| Fungsi Organisasi Reformasi Dan Birokrasi | | | | | |
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan | Indeks Reformasi Birokrasi | 100 % | 94.03 % | 5,96% |
| | | Persentase perangkat daerah yang | 100 % | N/A | N/A |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | CAPAIAN KINERJA % | PENYERAPAN ANGGARAN % | TINGKAT EFISIENSI % |
|---|---|---|---|---|---|
| | transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | mengimplementasikan analisa jabatan dan analisa beban kerja | | | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | N/A | N/A | N/A |
| | | Nilai capaian laporan kinerja instansi pemerintah | 100% | N/A | N/A |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik | 100% | 100% | 0% |
| | | Nilai PMPRB | 99,53% | 100% | 0% |
| Fungsi Kepala Daerah | | | | | |
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Indeks Reformasi Birokrasi | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | 100% | 97.67% | 2.33% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100.85% | 96,46% | 3.54% |
| Fungsi Umum Dan Administrasi | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100% | 98,42% | 1,58% |
| Fungsi Perekonomian Dan Keuangan | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91 % | 95,20% | 4,80% |
| Fungsi Kerja Sama Daerah | | | | | |
| **1.** | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | N/A | N/A | N/A |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | CAPAIAN KINERJA % | PENYERAPAN ANGGARAN % | TINGKAT EFISIENSI % |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | Meningkatnya Kerjasama/Kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pihak | Persentase kerjasama yang terfasilitasi | 100% | 100% | 100% |
| **3.** | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 108% | 98,04% | 1,96% |
| Fungsi Pembangunan Dan Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 92% | 95,96% | 4,04% |
| Fungsi Kesejahteraan Sosial | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 94.83% | 94.83% | 5,17% |
| Fungsi Pendidikan Dan Mental Spiritual | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100% | 99.25 | 0.75 |

**a. Biro Pemerintahan**

Terkait dengan sisa anggaran merupakan hasil sisa mati pengadaan barang/jasa, sehingga secara capaian kinerja tidak berdampak atau terealisasi 100% dimana pada Tahun 2022 terdapat 3,22% dengan capaian target kinerjanya sebesar 100%.

**b. Biro Hukum**

Dalam efesiensi pengunaan sumber daya dapat dijelaskan Indikator yang terkait efisiensinya sebagai berikut :

1) Presentase kualitas pelaksanaan anggaran dapat dijelaskan
   a) Pembiayaan transport sidang yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan pandemi serta peningkatan SDM dan dokumen asset yang semakin tertata dan tertib menjadi penanganan perkara tidak diperlukan upaya hukum kembali karena dimenagkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
   b) Selain itu efesiensi dalam pengunaan narasumber dalam kegiatan harmonisasi dan evaluasi produk hukum daerah sejalan Biro Hukum telah memiliki JFT Perancang peraturan perundang-undangan.
2) Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Reformasi BIrokrasi memiliki efesiensi 5% dengan pengunaan media virtual dalam pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan dan proses e produk hukum serta simplifikasi dan omnibus law.

**c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan data pada tabel diatas bahwa tingkat Capaian Penyerapan Anggaran pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 adalah sebesar 94.03 % dengan tingkat efisiensi sebesar 5,96 %.

**d. Biro Kepala Daerah**

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah dengan hasil Penilaian 4
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan hasil persentase 103,59%
3. Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39) dengan hasil penyelesaian dengan persentase 100%.

4. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61) dengan hasil penyelesaian dengan persentase 100%.

   Pada tahun 2022 realisasi anggaran Biro Kepala Daerah adalah sebesar 94,27% dengan tingkat efisiensi sebesar 5,73%. Persentase efisiensi yang diperoleh oleh Biro Kepala Daerah tergolong kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya di Biro Kepala Daerah.

**e. Biro Umum dan Administrasi**

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah mempunyai 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1) Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas
2) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran
3) Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua
4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Dari empat sasaran strategis diatas, hanya satu sasaran strategis yaitu meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang didukung oleh anggaran. Pada tahun 2022 capaian anggaran yang berhasil direalisasikan oleh Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp 728.652.025.262,00 (98,42%) dengan tingkat efisiensi sebesar Rp 11.707.110.677,00 (1,58%). Persentase efisiensi yang diperoleh oleh Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah tergolong kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya

**f. Biro Perekonomian dan Keuangan**

Penyerapan atau realisasi anggaran di Biro Perekonomian dan Keuangan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp.608.952.550 (enam ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau

sebesar 95,20% dari total anggaran Pergeseran Keenam Rp.639.659.496,- sehingga didapatkan tingkat efisiensi yaitu sebesar 4,80%**.** Adapun Rincian penyerapan berdasarkan Program yaitu sebagai berikut :

1) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 148.500.000, dan realisasi sebesar Rp.148.500.000,- (persentase capaian 100%).
2) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.61.001.265,- dan realisasi sebesar Rp.60.422.120,- (persentase capaian 99,05%)
3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.430.158.231,- dan realisasi sebesar Rp. 400.030.430,-. (persentase capaian 93,00%)

Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran = 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%)

Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur.

**g. Biro Kerja Sama Daerah**

Sehubungan dengan data capaian akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran, maka dengan ini maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.076.672.134 atau sebesar 6,16%. Adapun uraian realisasi anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 47.755.795.440,- terealisasi sebesar Rp. 38.881.933.488,-
2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 20.004.652.720,-. terealisasi sebesar Rp. 16.912.134.627,-
3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 1.085.602.223,- terealisasi sebesar Rp. 975.310.134

**h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

Terkait dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis pada IKU Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang memiliki anggaran program dan kegiatan hanyalah sasaran "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis" dengan Indikator Skor EKPPD adapun realisasi anggaran untuk sasaran ini adalah 98,27 persen.

**i. Biro Kesejahteraan Sosial**

Terkait persentase kualitas anggaran capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Sosial sebesar 92% sesuai tabel diatas, pada indikator sasaran : Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan tingkat realisasi anggaran sebanyak 95,96% dan efiensi sebesar 4,04% disebabkan adanya pergeseran anggaran dan sisa mati anggaran.

**j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual**

Efisiensi adalah selisih anggaran dengan realisasi, Efisiensi merupakan sisa mati dari hasil pengadaan dan sisa pengembalian belanja hibah dari 7 lembaga keagamaan yaitu :

1. Lembaga Bahasa dan Ilmu Al quran (LBIQ) Provinsi DKI Jakarta
2. Masjid Raya Hasyim Asyari
3. LP3KD Provinsi DKI Jakarta
4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta
5. Masjid Raya PPIJ
6. Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Provinsi DKI Jakarta
7. Persatuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Provinsi DKI Jakarta

Sehubungan dengan data capaian akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran, maka dengan ini maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.75 persen

**Tabel III.15**
**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja Sekretariat Daerah**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| FUNGSI PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | Nilai | 3,300 | N/A | 0% | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 5.187.869.226 | 5.066.187.470 | 97,65% |
| | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 702.952.835 | 635.100.271 | 90,34% |
| FUNGSI HUKUM | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | **%** | 91 | 90,38 | 99 % | - Fasilitasi & Koordinasi Hukum<br>- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi<br>- Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 3.415.278.605 | 3.086.858.381 | 99 |
| | | Nilai komponen | Nilai | 5 | 5 | 100 | Pemerintahan dan | 296.500.000 | 254.900.000 | 94, 6 % |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| | | area perubahan peraturan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | Kesejahteraan Rakyat | | | |
| FUNGSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya Program Penataan Organisasi | Nilai PMPRB | nilai | 92 | 91.57 | 99.53 | Program Penataan Organisasi | 193.800.000 | 193.800.000 | 100% |
| | | Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | 12 | N/A | N/A | Program Penataan Organisasi | 42.300.000 | 42.300.000 | 100% |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik | Persen | 46.7 | 50 | 100% | Program Penataan Organisasi | 109.200.000 | 109.200.000 | 100% |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Analisa Jabatan dan | Persen | 84 | 84 | 100% | Program Penataan Organisasi | N/A | N/A | N/A |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| | | Analisa Beban Kerja | | | | | | | | |
| FUNGSI KEPALA DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 85.00 | N/A | N/A | | | | |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | Skala | 4 | 4 | 100% | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.183.796.000 | 2.096.700.000 | 96,01% |
| | | | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 736.796.000 | 736.700.000 | 99,99% |
| | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan | 894.945.620 | 881.078.600 | 98,45% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| | | | | | | | Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | | | | | | Penyiapan Materi Pimpinan | 196.800.000 | 196.800.000 | 100% |
| | | | | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 73.660.500 | 65.783.500 | 89,31% |
| | | | | | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1.895.732.770 | 1.862.157.994 | 98,23% |
| | | | | | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 423.103.885 | 416.366.400 | 98,41% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 91% | 91.77% | 100.85% | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 9.488.672.160 | 9.152.641.808 | 96.46% |
| FUNGSI UMUM DAN ADMINISTRASI | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan | Nilai | **4** | 4 | 100% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 740.359.135.939 | 728.652.025.262 | 98,42% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| | Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 91% | 98,42% | 108,15% | | | | |
| 3 | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas dan Integratif Nomor (12) | Persentase | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 4 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1.Persentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39) | Persentase | 100% | 100% | 100% | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| | | 2.Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61) | Persentase | 100% | 100% | 100% | | | | |
| FUNGSI PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | % | 91 | 95,20% | 104,80% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 430.158.231 | 400.030.430 | 93,00% |
| | | | | | | | 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 800.000 | 800.000 | 100% |
| | | | | | | | 2. Fasilitasi Kunjungan Tamu | 44.570.800 | 44.533.054 | 96,46% |
| | | | | | | | 3. Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy | 112.384.800 | 102.817.800 | 91,48% |
| | | | | | | | 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja | 212.682.674 | 207.878.400 | 49,32% |
| | | | | | | | 5. Penyediaan Barang | 43.409.520 | 27.731.176 | 59,52% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| | | | | | | | Cetakan dan Penggandaan | | | |
| | | | | | | | 6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 16.310.437 | 16.270.000 | 99,75% |
| | | | | | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | 148.500.000 | 148.500.000 | 100% |
| | | | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 148.500.000 | 148.500.000 | 100% |
| | | | | | | | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 61.001.265 | 60.422.120 | 99,05% |
| | | | | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 61.001.265 | 60.422.120 | 99,05% |
| FUNGSI KERJA SAMA DAERAH | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya tata | Skor EKKPD | Nilai | 3,3 | N/A | 0% | Program Pemerintahan | 47.755.795.440 | 38.881.933.488 | 81,42% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| | kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | | | | | | dan Otonomi Daerah | | | |
| | | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 91 | 98,04 | 108 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.085.602.223 | 975.310.134 | 89,84% |
| | | Skor EKKPD | | | | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 20.004.652.720 | 16.912.134.627 | 84,54% |
| FUNGSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | Nilai | 3,30 | N/A | N/A | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 183.718.080 | 179.832.000 | 97,88% |
| | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 650.268.451 | 639.762.666 | 98,38% |
| FUNGSI KESEJAHTERAAN SOSIAL | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | persen | 91 | 92 | 101,09 | Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 522.668.537 | Rp. 501.538.536 | 95,96% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2022 | | | CAPAIAN % | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | | |
| | adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | | | | | | | | | |
| FUNGSI PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | Nilai | 3.3 | | | Program Kesejahteraan Rakyat | 358.084.137.965 | | |
| | | | | | | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | N/A | N/A | N/A |
| | | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | persen | 91 | 91,08 | 100,08 | Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi | 614.513.830 | | |

## 4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL

Sesuai dengan data Indikator Kinerja Utama tahun 2022 sebagaimana dijelaskan diatas, maka perbandingan dengan capaian nasional dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini :

### a. Biro Pemerintahan

Pada Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan memiliki sasaran Skor EKPPD, dimana hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 atas penilaian capaian kinerja daerah tahun 2021, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan secara target nasional

### b. Biro Hukum

Pada Indikator Kinerja Utama Nilai Komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi. Juga dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional, yaitu : pada kegiatan nasional dalam Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi dengan jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (usulan rekomendasi). Biro Hukum dengan KSD 65 Deregulasi /Penataan Produk Hukum Daerah telah melakukan deregulasi produk hukum daerah dibidang pembangunan investasi dan perijinan sejak tahun 2021 serta pelaksanaan simplifikasi dan Omnibus law

### c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dapat disimpulkan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah 78,88 dengan kategori BB. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 belum keluar nilainya, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan target nasional

**d. Biro Kepala Daerah**

Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

**e. Biro Umum dan Administrasi**

Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan terhadap pelayanan kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

**f. Biro Perekonomian dan Keuangan**

Pada Indikator Kinerja Utama, Juga dapat diperbandingkan dengan capaian secara Provinsi dan dengan Target Nasional, yaitu :

**Tabel III.16**
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan Keuangan dengan IPM Target Provinsi dan IPM Target Nasional Tahun 2022**

| NO | IKU | Capaian Target 2021 (Biro Perkeu) | Target Impact Provinsi (2021) | Capaian Target Impact IPM Provinsi DKI Jakarta (2021) | Tingkat Capaian Target Impact IPM Provinsi DKI Jakarta (2021) | IPM Nasional (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Ketidaksesuaian antara Peraturan dengan Pelaksanaan | 100% | 80,80 | 80,77 | 99,96% | 72,29 |
| 2 | Jumlah Ketidaksesuaian antara Kebijakan dengan Peraturan | 100% | 80,80 | 80,77 | 99,96% | 72,29 |
| 3 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | 100% | 80,80 | 80,77 | 99,96% | 72,29 |

Capaian realisasi target Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan Keuangan pada Tahun Anggaran 2022 mencapai target maksimal 100 (seratus) persen, dan berdasarkan informasi pada tabel diatas, capaian Indikator Kinerja Utama telah melampaui target + capaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, masing-masing sebesar 99,96% dan 72,29%.

**g. Biro Kerja Sama Daerah**

Untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Biro Kerja Sama Daerah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tujuan nasional.

**h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja Utama Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup tidak dapat diperbandingkan dengan capaian IKU secara nasional

**i. Biro Kesejahteraan Sosial**

Untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Biro Kesejahteraan Sosial tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tujuan nasional

**j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual**

Untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tujuan nasional

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel III.17**
**Realisasi Anggaran**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fungsi Pemerintahan | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD<br>Skor EKPPD | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 5.187.869.226 | 5.066.187.470 | 97,65% | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 4.276.622.366 | 4.268.079.600 | 99,80% |
| | | | | | | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | 911.246.860 | 798.107.870 | 87,58% |
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 5.187.869.226 | 5.066.187.470 | 97,65% | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 146.750.314 | 131.250.132 | 89,45% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 126.720.000 | 79.800.000 | 62,97% |
| | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 19.601.043 | 14.284.739 | 72,88% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Keprotokolan | 409.881.478 | 409.765.400 | 99,97% |
| Fungsi Hukum | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 2.299.005.832 | 2.071.419.778 | 90% | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | 141.709.888 | 140.819.806 | 99% |
| | | | | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | 2.157.295.944 | 1.930.599.972 | 90% |
| | | | Pengelolaan Kota Administrasi | 43.600.000 | 36.700.000 | 84% | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi<br>Fasilitasi Bantuan Hukum | 43.600.000 | 36.700.000 | 84% |
| | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 649.997.673 | 601.694.003 | 92% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | | | Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 83.988.800 | 66.503.273 | 80 % |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 397.048.873 | 366.277.730 | 92% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 168.960.000 | 168.913.000 | 99% |
| | | Nilai komponen area perubahan peraturan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokras | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 422.675.000 | 377.044.400 | 90% | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 422.675.000 | 377.044.400 | 90% |
| Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksanaanya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi Kelembagaan dan Analisis | Program Penataan Organisasi | 345.300.000 | 345.300.000 | 100% | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 108.300.000 | N/A | N/A |
| | | | | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 472.080.700 | 345.300.000 | 73.14% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jabatannya | | | | | | | | |
| 2 | Terlaksanannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 131.905.507 | 103.437.750 | 78.42% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 311.000 | 311.000 | 100% |
| | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 56.671.307 | 51.172.550 | 90.29% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.923.200 | 51.955.200 | 69.34% |
| Biro Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 9.488.672.160 | 9.152.641.808 | 96.46% | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.183.796.000 | 2.096.700.000 | 96,01% |
| | | | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 736.796.000 | 736.700.000 | 99,99% |
| | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 894.945.620 | 881.078.600 | 98,45% |
| | | | | | | | Penyiapan Materi Pimpinan | 196.800.000 | 196.800.000 | 100% |
| | | | | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 73.660.500 | 65.783.500 | 89,31% |
| | | | | | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1.895.732.770 | 1.862.157.994 | 98,23% |
| | | | | | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 423.103.885 | 416.366.400 | 98,41% |
| | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksana | Program Penunjang Urusan Pemerintah | 9.488.672.160 | 9.152.641.808 | 96.46% | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 188.493.423 | 177.384.090 | 94,11% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | an Anggaran | Daerah Provinsi | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.126.321 | 1.901.925 | 60,84% |
| | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 123.412.372 | 120.362.770 | 97,53% |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan/Material | 827.252.690 | 827.180.600 | 99,99% |
| | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 101.763.640 | 94.554.793 | 92,92% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 117.538.044 | 116.732.337 | 99,31% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 257.241.600 | 198.703.972 | 77,24% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 262.231.200 | 181.843.200 | 69,34% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | 456.999.623 | 447.450.582 | 97,91% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.550.208 | 34.059.000 | 83,99% |
| | | | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.360.103.066 | 2.271.798.528 | 96,26% |
| | | | | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 736.796.000 | 736.700.000 | 99,99% |
| | | | | | | | Penyiapan Materi Pimpinan | 196.800.000 | 196.800.000 | 100,00% |
| | | | | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 249.967.566 | 240.882.007 | 96,37% |
| | | | | | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 2.248.346.902 | 2.208.843.004 | 98,24% |
| | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 894.945.620 | 881.078.600 | 98,45% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 423.103.885 | 416.366.400 | 98,41% |
| Biro Umum Dan Administrasi | | | | | | | | | | |
| **1** | **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Memfasilitasi PD/UPD, Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota dan Rumah Dinas** | **Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | **772.585.809.867** | **757.389.212.306** | **98,42%** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **582.095.689.778** | **576.841.896.085** | **99,10%** |
| | | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **9.490.742.601** | | |
| | | | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **161.756.320** | | |
| | | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **39.399.714.789** | | |
| | | | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **28.819.807.084** | | |
| | | | | | | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah** | **67.721.627.720** | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **dan Wakil Kepala Daerah** | | | |
| | | | | | | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **5.111.283.879** | | |
| | | | | | | | **Fasilitasi Keprotokolan** | **7.558.513.768** | | |
| Biro Perekonomian Dan Keuangan Setda | | | | | | | | | | |
| | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | 148.500.000 | 148.500.000 | 100,00% | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | 148.500.000 | 148.500.000 | 100,00% |
| | | | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 61.001.265 | 60.422.120 | 99,05% | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 61.001.265 | 60.422.120 | 99,05% |
| | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 215.010.584 | 187.264.700 | 87,10% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 800.000 | 800.000 | 100% |
| | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 300.662.994 | 280.142.630 | 93,17% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 112.384.800 | 102.817.800 | 91,48% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16.310.437 | 16.270.000 | 99,75% |
| Biro Kerjasama Daerah | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKKPD | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 47.755.795.440 | 38.881.933.488 | 81,42% | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 44.132.852.500 | 35.421.446.488 | 80,26% |
| | | | | | | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 3.622.942.940 | 3.460.487.000 | 95,51% |
| | | | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 20.004.652.720 | 16.912.134.627 | 84,54% | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 20.004.652.720 | 20.004.652.720 | 84,54% |
| | Meningkatnya Kerja Sama / Kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pihak | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.085.602.223 | 975.310.134 | 89,84% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.998.500 | 12.090.000 | 80,61% |
| | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 555.117.988 | 496.996.196 | 79,65% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 467.747.484 | 424.021.738 | 89,77% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 47.738.251 | 42.202.200 | 88,40% |
| Biro Pembangunan Dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| 2. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Skor EKPPD | 1. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 183.718.080 | 179.832.000 | 97,88% | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 183.718.080 | 179.832.000 | 97,88% |
| | | | 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 650.268.451 | 639.762.666 | 98,38% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.062.160 | 3.060.700 | 99,95% |
| | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 283.329.769 | 278.364.471 | 98,25% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 333.764.946 | 329.477.495 | 98,72% |
| | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | 30.111.576 | 28.860.000 | 95,84% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Biro Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Program Kesejahteraan Rakyat | 245.098.537 | 223.968.536 | 100% | Fasilitasi Pengembangan Kesjahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 131.880.000 | 131.880.000 | 100% |
| | | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesjahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 56.760.000 | 56.760.000 | 100% |
| | | | Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi | 245.098.537 | 223.968.536 | 91% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 320.000 | 320.000 | 100% |
| | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 195.523.067 | 176.749.536 | 90.40% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37.461.600 | 35.910.000 | 95,86% |
| | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | 11.793.870 | 10.898.000 | 93,18% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | Program Penataan Organisasi | 88.930.000 | 88.930.000 | 100% | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 88.930.000 | 88.930.000 | 100% |
| Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 1) Program Kesejahteraan Rakyat | 356.000.369.673 | 353.352.429.196 | 99,26% | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | 355.909.629.673 | 353.261.689.196 | 99,26% |
| | | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 90.740.000 | 90.740.000 | 100% |
| | | | 2) Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi | 169.005.370 | 157.236.158 | 93,04% | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 3.000.000 | 100% |
| | | | | | | | Admnistrasi Umum Perangkat Daerah | 78.669.154 | 71.527.253 | 90,92% |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 37.461.600 | 32.886.000 | 89,79% |
| | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 49.874.616 | 49.822.905 | 99,90% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | 3) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum | 54.600.000 | 54.600.000 | 100% |

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dijabarkan program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana berikut ini.

**1. BIRO PEMERINTAHAN**

Sasaran strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan dokumen Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 adalah Skor EKPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional, dimana dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator program yaitu Persentase penyelesaian masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dimana didalamnya memiliki indikator kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan target Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga terdapat factor-faktor pendukung keberhasilan dengan melakukan pendampingan Perangkat Daerah yang menjalankan urusan untuk melaporkan capaian atas target indikator kinerja kunci yang diampunya. Salah satu faktor yang mendukung tingginya angka capaian realisasi anggaran adalah karena Biro Pemerintah sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

**2. BIRO HUKUM**

Sehubungan dengan data capaian akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran pada program fasilitasi dan koordinasi hukum dengan mengoptimalkan SDM /Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta serta adanya simplifikasi dan penerapan omnibuslaw yang didiukung dengan sistem e-produk hukum, sehingga Biro Hukum dapat merealisasikan anggaran dengan angka capaian yang tinggi. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong tingginya capaian realisasi antara lain dikarenakan

pelaksanaan kegiatan sudah dapat terjadwal sesuai rencana karena keadaan pandemik sudah semakin membaik, serta pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan telah didukung melalui sistem digitalisasi melalui e produk hukum dan perencanaan prompergub dan promperda serta penerapan simplifikasi Omnibuslaw.

**3. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI**

Terdapat 2 program dan 5 kegiatan yang diakomodir pada anggaran tahun 2022 untuk mendukung capaian IKU. Program / kegiatan menunjang keberhasilan tersebut adalah :

a. Program Penataan Organisasi

Program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan serta Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat

**3. BIRO KEPALA DAERAH**

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua indikator kinerja pada Biro Kepala Daerah tahun 2022 telah melebihi target dengan capaian melebihi 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Adapun penyebab keberhasilan antara lain:

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.

a. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

b. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu

c. Faktor kepemimpinan, yang menjadi aspek pendukung kinerja melalui motivasi, arahan dan bimbingan dari pemimpin serta pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin.

d. Faktor Tim, yakni dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro KDH mengerti betul harus saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk menunjang kinerja pegawai.

Selain terdapatnya penyebab yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

a. Dinamika Jadwal kegiatan pimpinan yang meningkat. Sebagai solusi dengan meningkatkan jejaring koordinasi internal maupun lintas SKPD/UKPD.
b. Baru terpilihnya Wakil Gubernur definitif sisa masa jabatan 2017-2022 pada awal Triwulan II. Sebagai solusi dengan mengusulkan perubahan pada APBD-P Tahun 2020 dan meningkatkan penyerapan.
c. Pengaruh tekanan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal Biro KDH sebagai solusi dengan mengembangkan sistem informasi.
d. Kurangnya sumber daya manusia dikarenakan banyak pegawai yang memasuki masa pensiun namun tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai yang seimbang, sehingga beban kerja yang terus meningkat tidak proporsional dengan jumlah sumber daya yang terus berkurang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

a. Program 1

   Pada Indeks Kepuasan pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah memiliki kerberhasilan dikarenakan kegiatan-kegiatan yang terdapat di bawahnya dapat berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

   1) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
   2) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
   3) Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   4) Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan
   5) Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

6) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
7) Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

## 5. BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI

Biro Umum dan Administrasi Setda hanya memiliki satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan satu indikator yang menunjang pencapaian perjanjian kinerja, yaitu :

a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
   Target atas indikator tersebut adalah sebesar indeks 4 dengan nilai realisasi sebesar indeks 4, sehingga capaiannya sebesar 100%

Adapun indikator program diatas dapat terealisasi dengan baik karena didukung oleh 8 kegiatan yang semuanya dapat terealisasi dengan baik pula, yaitu :

d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
k. Fasilitasi Keprotokolan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua indikator kinerja pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah tahun 2022 telah sesuai target dengan capaian 4 atau 100% hal ini dikarenakan :

a. Sistem perencanaan yang semakin baik dengan memperhatikan arah, kebijakan serta prioritas anggaran.
b. Pelaksanaan anggaran tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.
c. Adanya komitmen dari pengguna anggaran untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.
d. Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pengguna anggaran, pemangku kepentingan serta stakeholders terkait.

## 6. BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

Secara umum Capaian realisasi Biro Perekonomian dan Keuangan pada 3 (tiga) program yang diampu telah mencapai target maksimal 100%, pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator sasaran yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan sasaran yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel (target capaian 2022 sebesar 91%). Pagu Anggaran/SPS Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.639.659.496,- dan capaian realisasi terhadap pagu anggaran yaitu sebesar Rp.608.952.550,-, atau sebesar 95,20% dari total anggaran sehingga capaian realisasi telah melampaui target tahunan. Sehubungan dengan data capaian akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran, maka dengan ini maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,80%.

Sesuai dengan tabel capaian realisasi anggaran dapat dijabarkan rincian penyerapan terkait dengan program / kegiatan yang ikut mendukung ketercapaian realisasi atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

~~a.~~ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari satu Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Administrasi Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.800.000.- atau 100% dari total pagu anggaran.

~~b.~~ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu : 1).Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 2).Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, 3).Fasilitasi Kunjungan Tamu. Pagu anggaran pada kegiatan ini yaitu sebesar Rp.300.662.994,- dan realisasi sebesar Rp. 280.142.630,- atau sebesar 93,17% dari total pagu anggaran.

~~c.~~ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.384.800,- dan realisasi sebesar Rp.102.817.800,- atau sebesar 91,48% dari pagu anggaran.

~~d.~~ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran

sebesar Rp.16.310.437,- dan realisasi sebesar Rp.16.270.000,- atau sebesar 99,75% dari pagu anggaran.

~~e.~~ Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.001.265,- dan realisasi sebesar Rp. 60.422.120,- atau sebesar 99,05% dari pagu anggaran.

~~f.~~ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro, dengan pagu anggaran sebesar Rp.148.500.000,- dan capaian realisasi sebesar Rp.148.500.000,- dengan demikian realisasi mencapai capaian maksimal yaitu sebesar 100% dari pagu anggaran~~.~~

Adapun penyebab keberhasilan tingginya capaian realisasi anggaran, antara lain sebagai berikut :

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik

**7. BIRO KERJASAMA DAERAH**

Dalam Biro Kerjasama Daerah terdapat 3 program dan 7 Kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja, Adapun analisanya dapat dilihat sebagaimana berikut :

a. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

   Program ini memiliki capaian 100% dari semua Kegiatan, yakni Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Fasilitasi Kerjasama Daerah. Semua indikator memenuhi target, hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum terdapat kendala terkait pembatasan perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara sehingga penyerapan anggaran tidak dapat optimal.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Program tersebut memiliki indikator kinerja adalah Persentase Kerjasama Luar Negeri yang terfasilitasi dan berhasil, serta memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu

Fasilitasi Kerjasama Daerah, yang memiliki Aktivitas Sub Kegiatan U20 Mayors Summit. Adapun capaian tahun anggaran 2022 adalah sebesar 100%.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki Indikator kinerja program adalah “Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor ”dimana memiliki realisasi sebesar 100% dari target 100%. Program tersebut memiliki 4 (empat) kegiatan antara lain :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini memiliki indicator kinerja kegiatan yakni Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dimana memiliki realisasi sebesar 4 dari target sebesar 4.

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini memiliki indikator kinerja kegiatan yakni Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum dimana memiliki realisasi sebesar 4 pelaksanaan dari target sebesar 4.

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini memiliki indikator kinerja kegiatan yakni Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimana memiliki realisasi sebesar 4 dari target sebesar 4.

4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini memiliki indikator kinerja kegiatan yakni Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimana memiliki realisasi sebesar 4 dari target sebesar 4.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong capaian realisasi anggaran, diantaranya sebagai berikut :

a. Terdapat Kegiatan antar pemerintah dan Fasilitasi Pemerintahan Umum yang terselenggara dengan baik karena mitra kerja yang kooperatif serta OPD yang dapat bekerja sama sehingga target tercapai sesuai waktu dan rencana yang ditentukan.
b. Kemampuan menyediakan sarana dan parasarana penunjang kerja yang baik di Biro Kerja Sama Daerah dengan cepat dan tepat.

c. Terlaksananya kegiatan yang dilakukan dengan proses tender dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan karena jejaring dengan mitra kerja yang terjalin baik.

## 8. BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran pada sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis” dengan indikator Skor EKPPD yang terdiri dari 2 program yaitu program kebijakan administrasi pembangunan dengan capaian 97,88 persen dan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan capaian 98,38 persen telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Adanya peran aktif semua personil pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan menjadi faktor pendorong tingginya capaian realisasi anggaran di tahun 2022. Adapun capaian tidak mencapai seratus persen disebabkan oleh efisiensi hasil pengadaan

## 9. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sesuai dengan tabel diatas yaitu analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja, Capaian keseluruhan Biro Kesejahteraan Sosial sebesar 95,96% hasil ini terdapat efisiensi anggaran karena pergeseran anggaran dari program kesejahteraan rakyat dan sisa mati dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sehingga menyebabkan capaianya menjadi 95,96%. Salah satu faktor pendorong yang mendukung tercapainya realisasi anggaran adalah karena seluruh pegawai memiliki komitmen yang sama untuk dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Sehubungan dengan data capaian akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran, maka dengan ini maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,04 persen.

Terdapat 3 program dan 7 kegiatan yang diakomodir pada anggaran tahun 2022 untuk mendukung capaian IKU. Dari Capaian sesuai table diatas maka program dan kegiatan dapat menunjang keberhasilan capaian IKU antara lain :

1) Biro Kesejahteraan Sosial telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
2) Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD dibawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial.
3) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro kesejahteraan Sosial dilaksanakan Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

**10. BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL**

Terdapat 3 program dan 7 kegiatan yang diakomodir pada anggaran tahun 2022 untuk mendukung capaian IKU. Program / kegiatan menunjang keberhasilan didukung oleh:

1) Tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
2) Koordinasi intensif dengan SKPD terkait.
3) Program / kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Program / kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat walaupun tidak ada anggaran pelaksanaan tetap diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan.

Sesuai dengan tabel III.17 diatas, capaian realisasi atas Indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 100,08%, dari target ditetapkan sebesar 91% dan realisasi sebesar 91,08%. Salah satu faktor pendorong yang mendukung tercapainya realisasi anggaran adalah adanya komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja.

# BAB IV PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi mengenai gambaran umum dan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara sistematis mulai Bab I sampai dengan Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah telah terlaksana dengan baik.
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan segenap jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur.
3. Sebagian besar sasaran strategis adalah sasaran strategis baru sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022.
4. Dalam pencapaian sasaran strategis, dari 60 (enam puluh) indikator kinerja yang ditetapkan, telah berhasil diwujudkan dengan baik dan maksimal pencapian sasaran tersebut. Keberhasilan tersebut lebih disebabkan pada peningkatan upaya perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 150 TAHUN 2019
Tanggal 31 Desember 2019

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

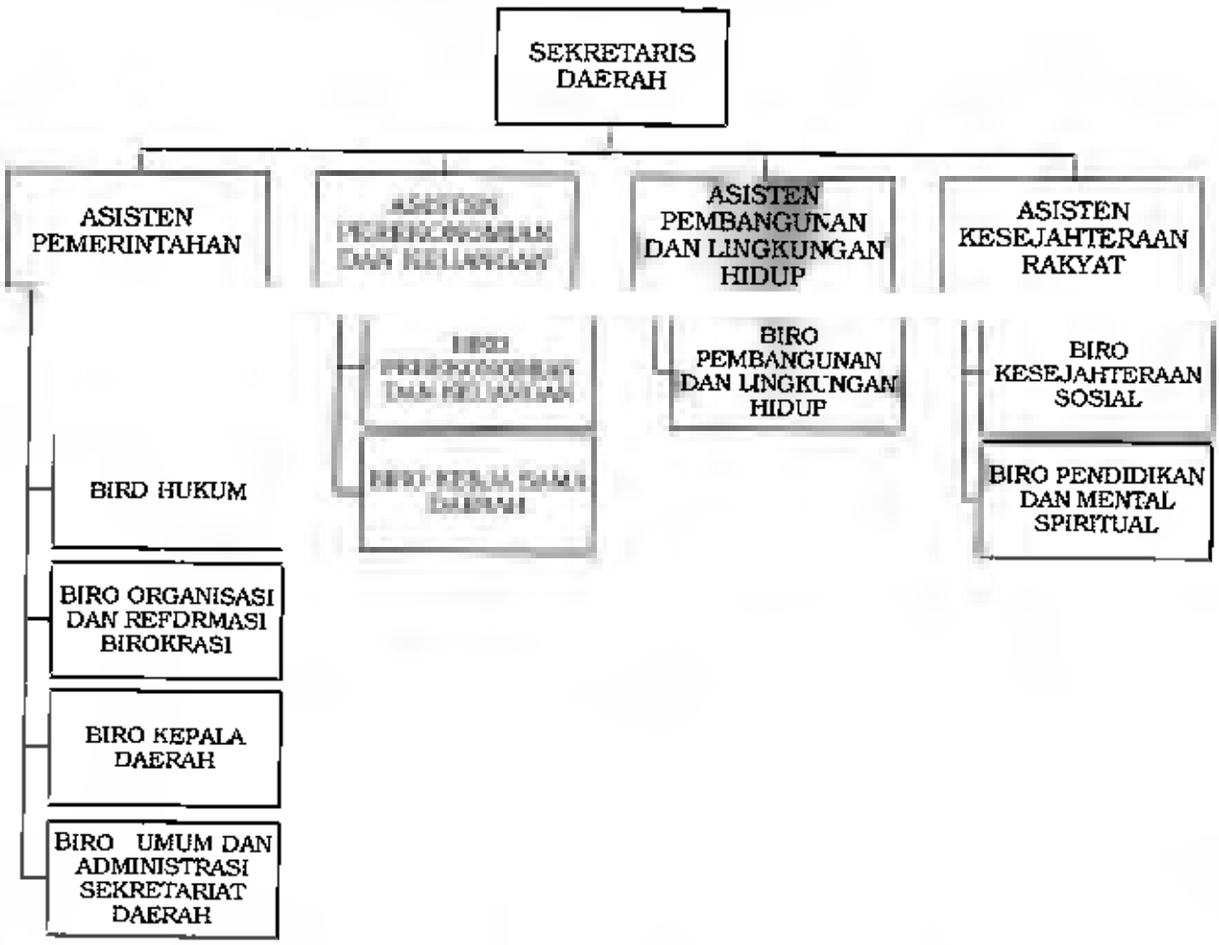


2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN

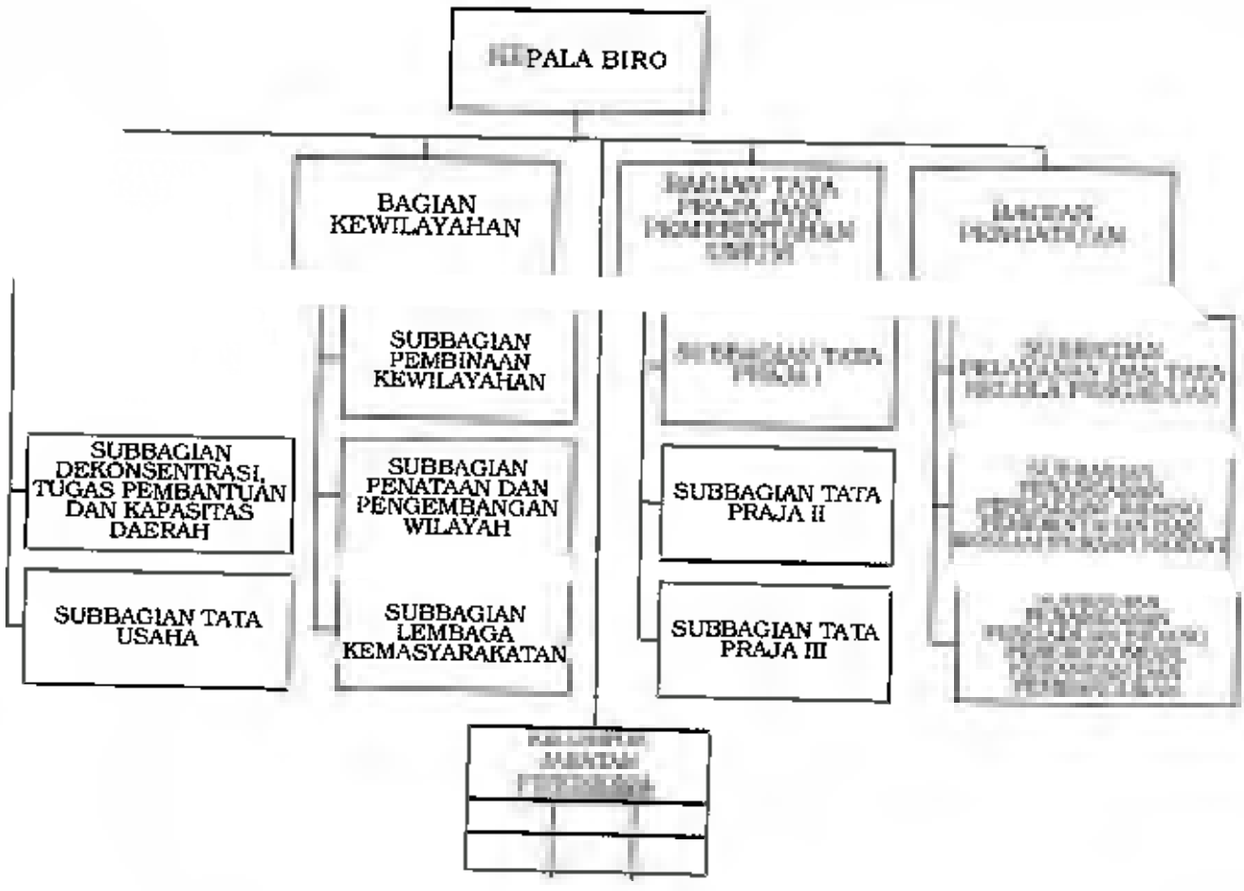

3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM

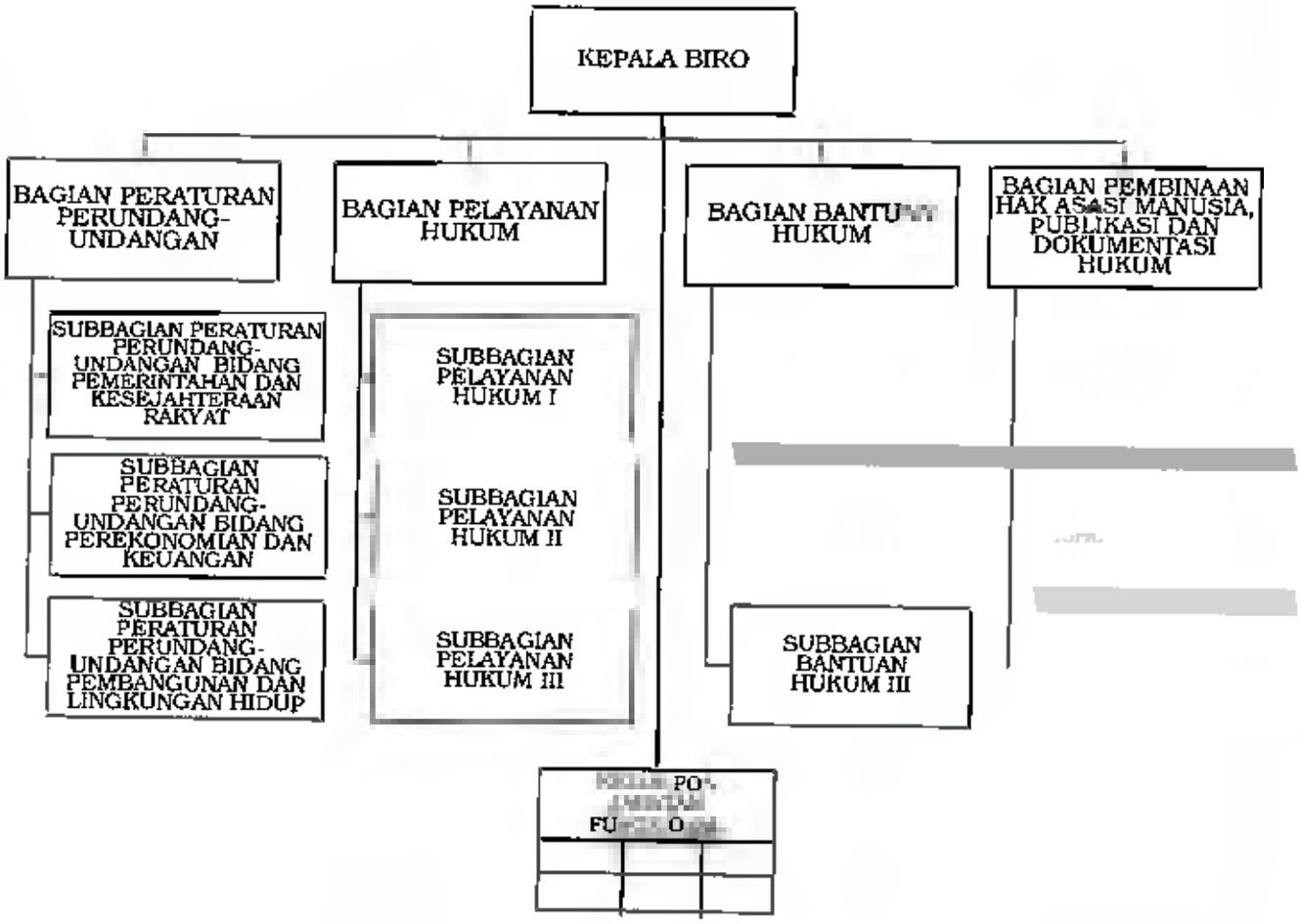


4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

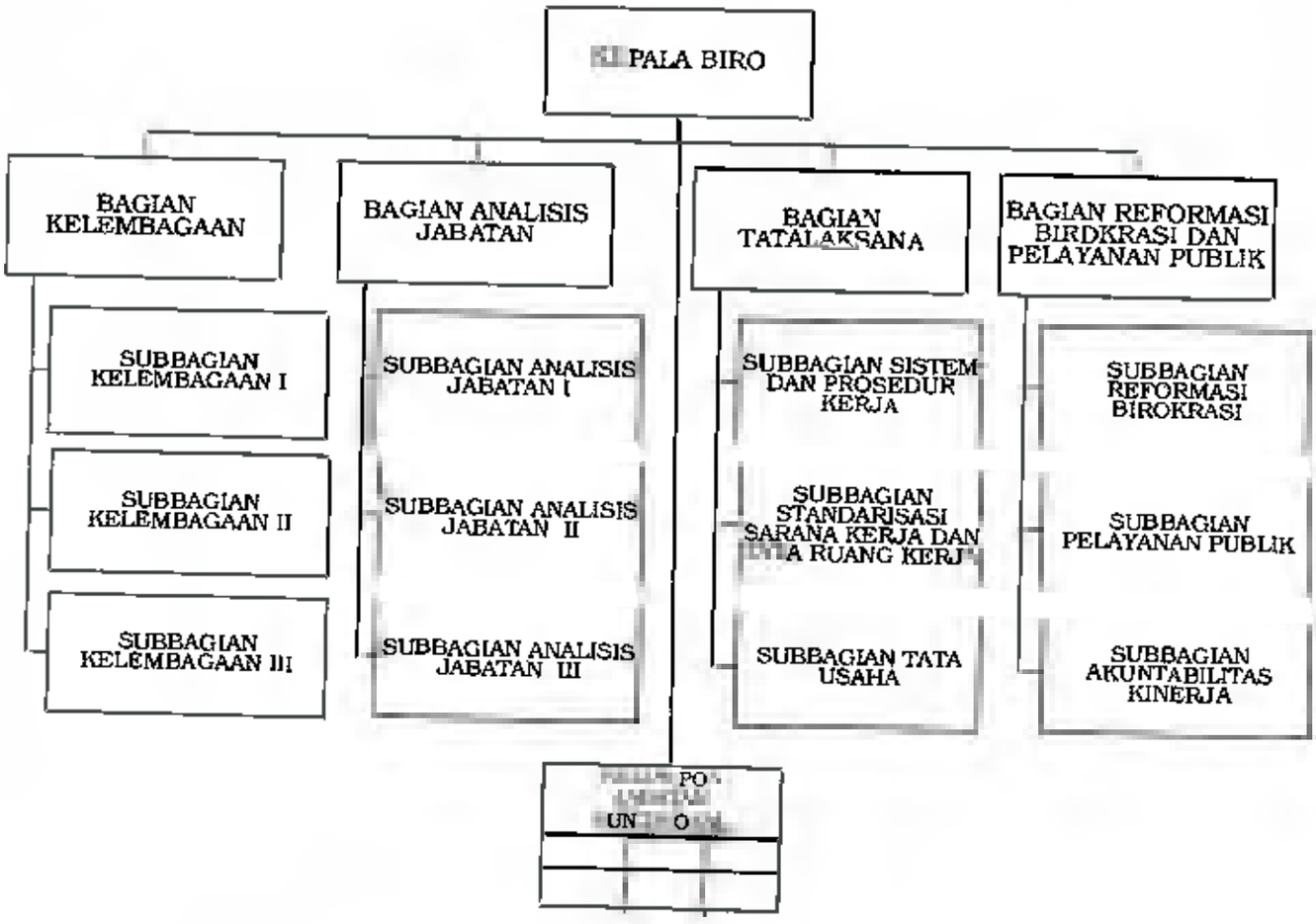

5 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEPALA DAERAH

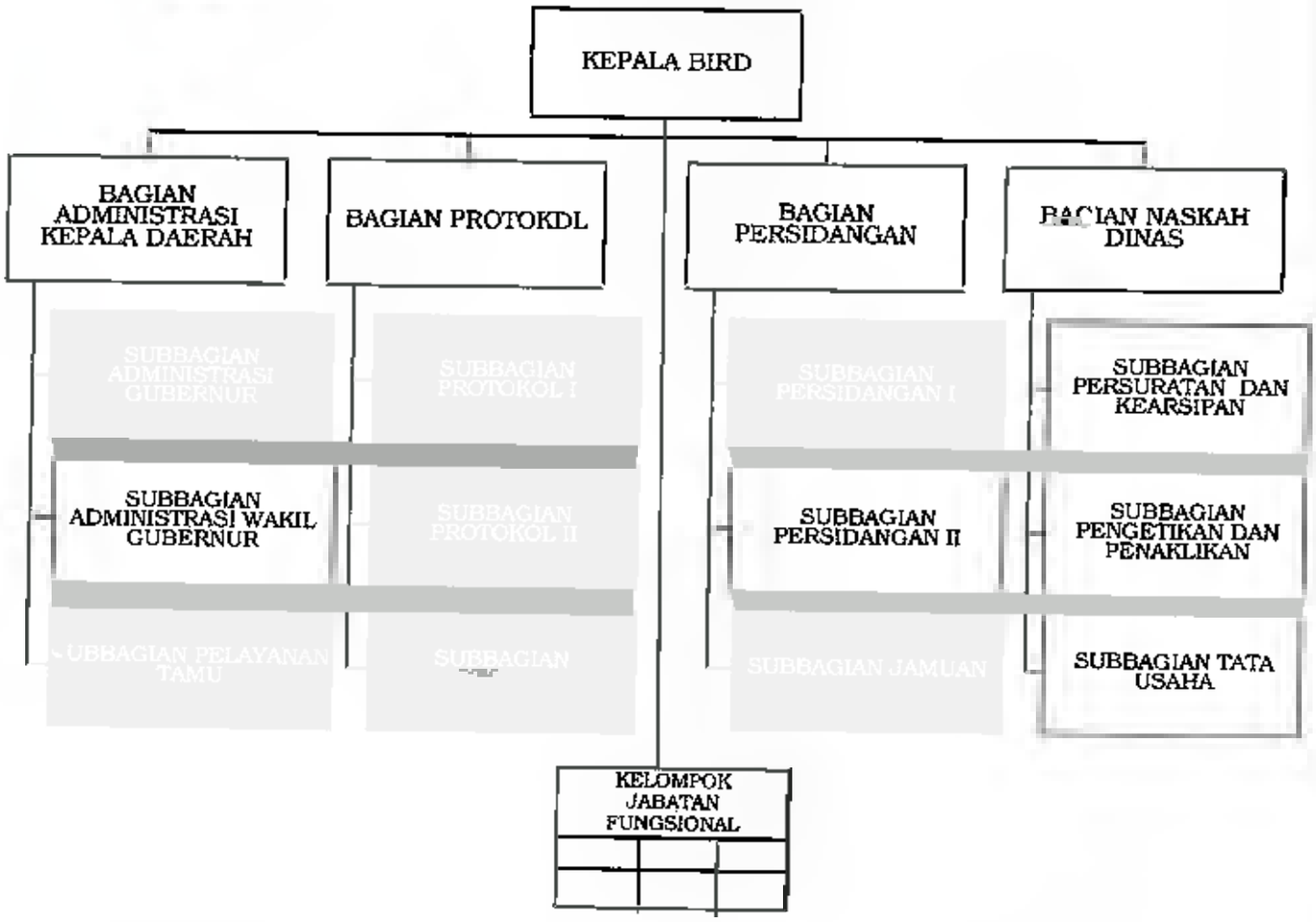


6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIS DAERAH

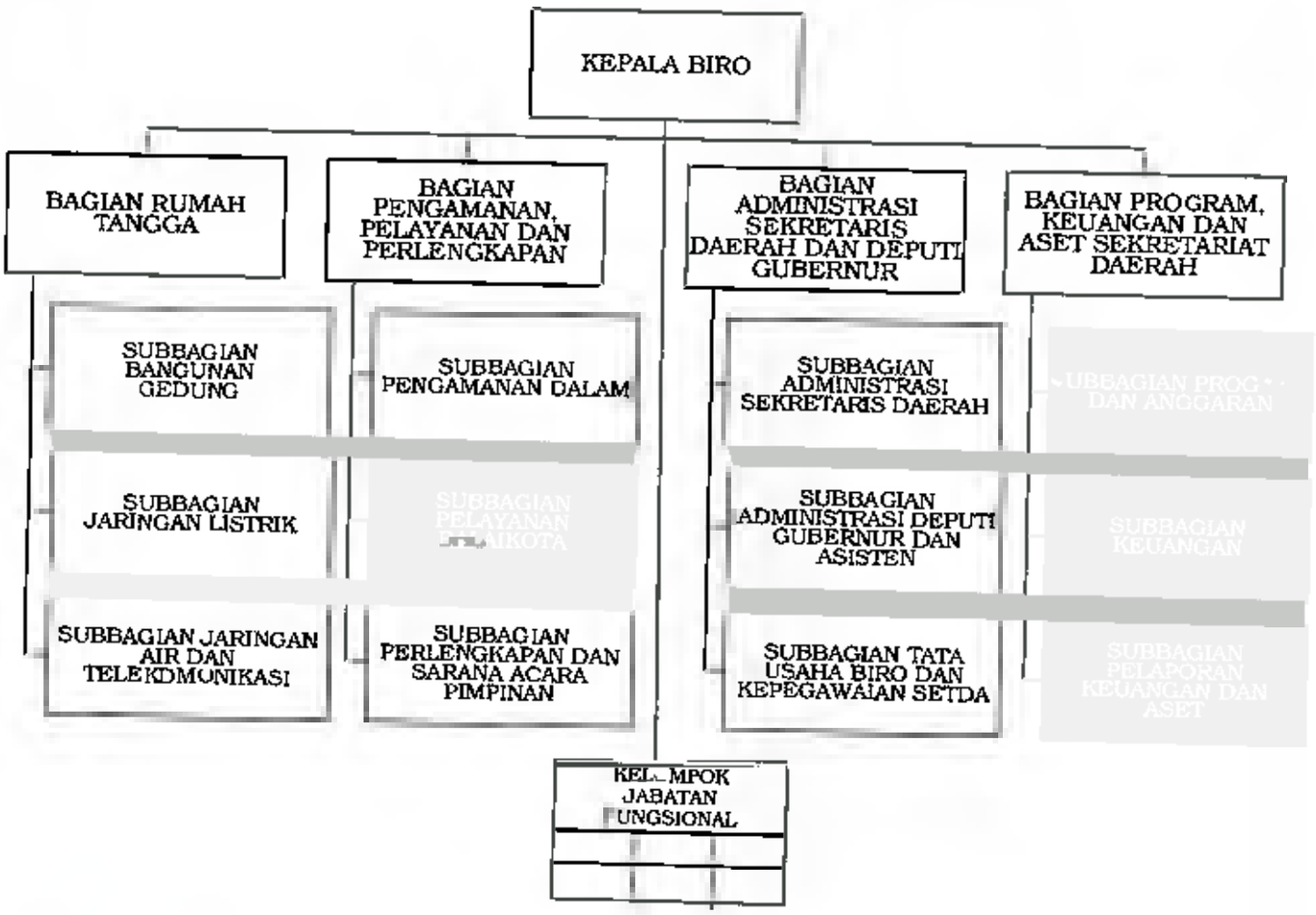

7. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

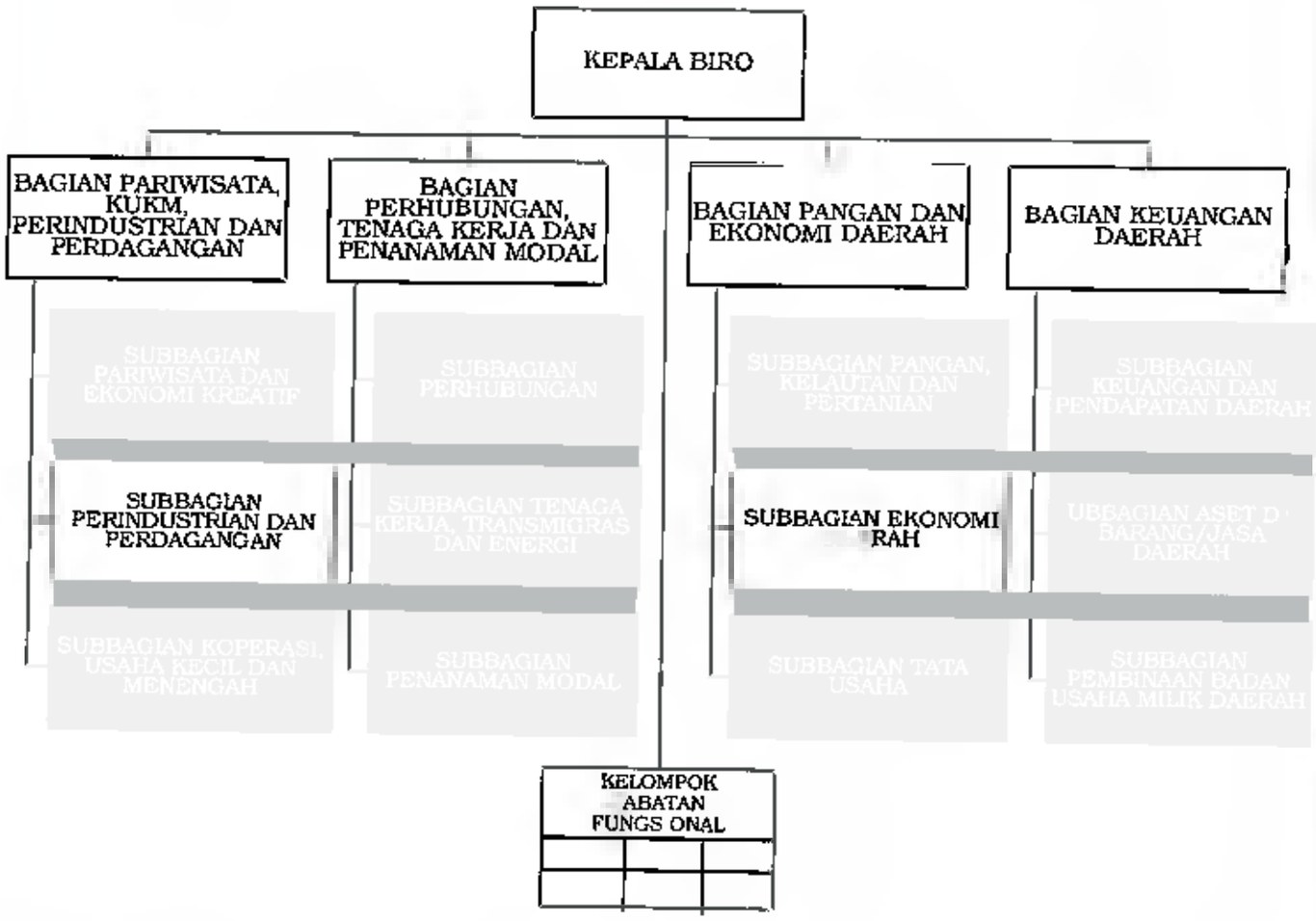


8 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJA SAMA DAERAH

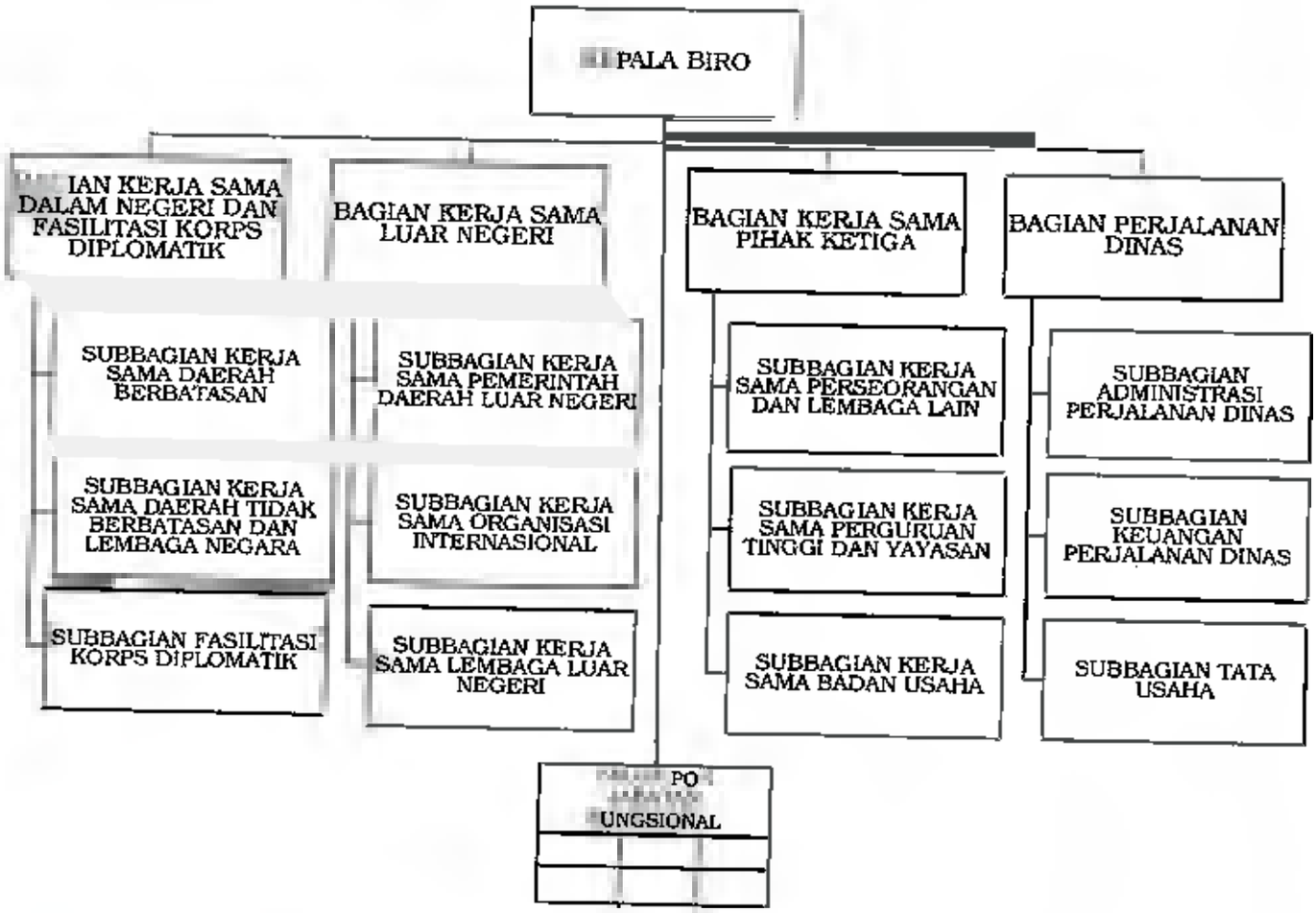

9. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

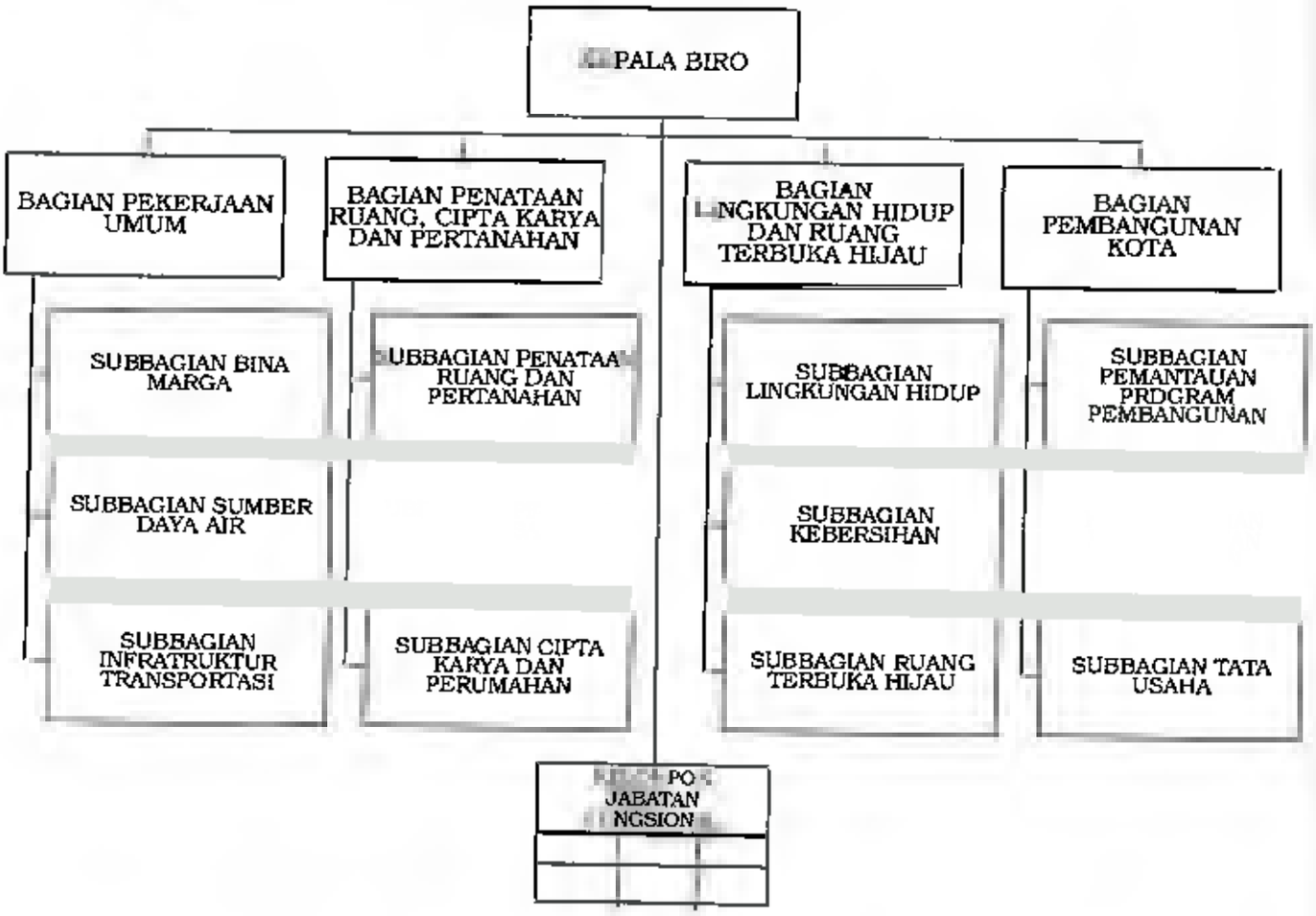


10. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

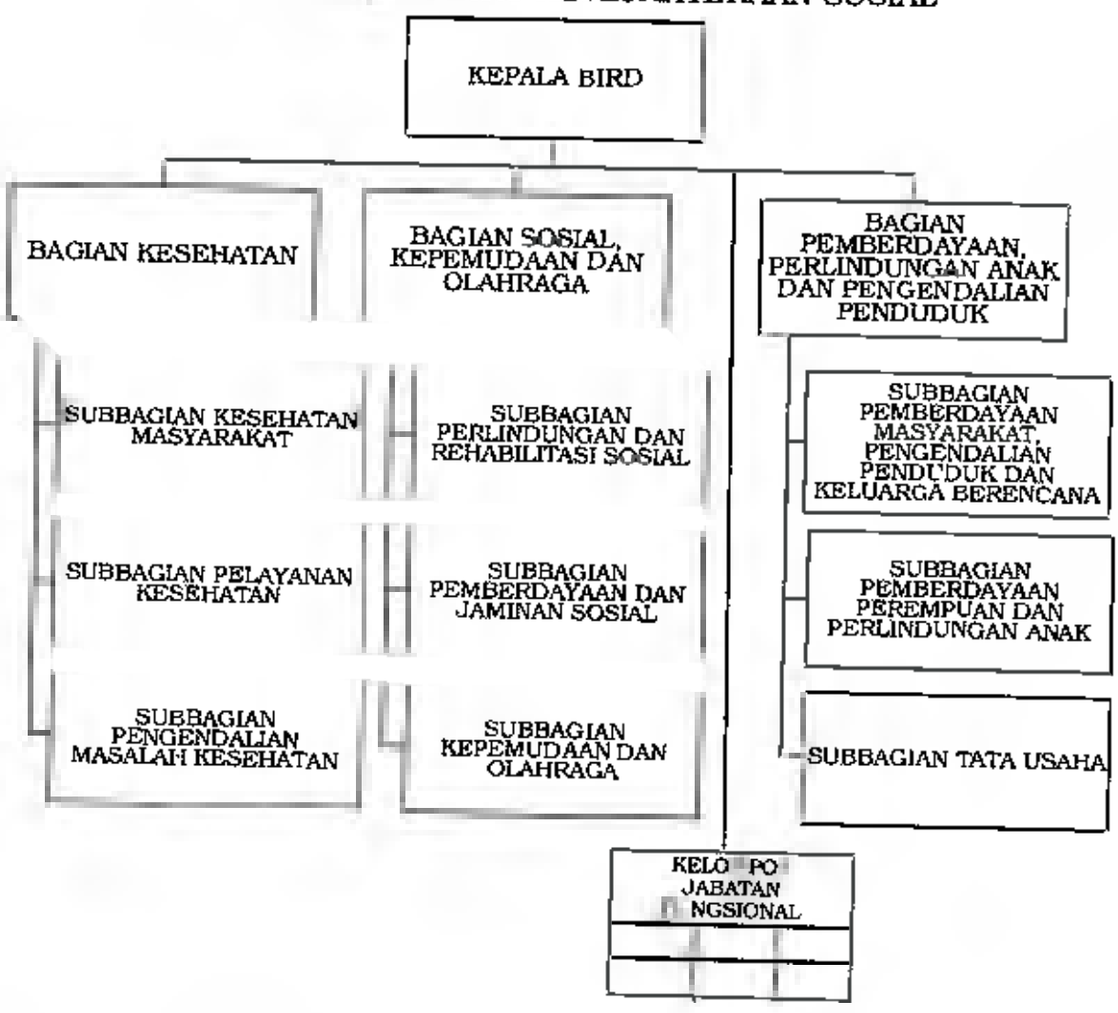

11. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

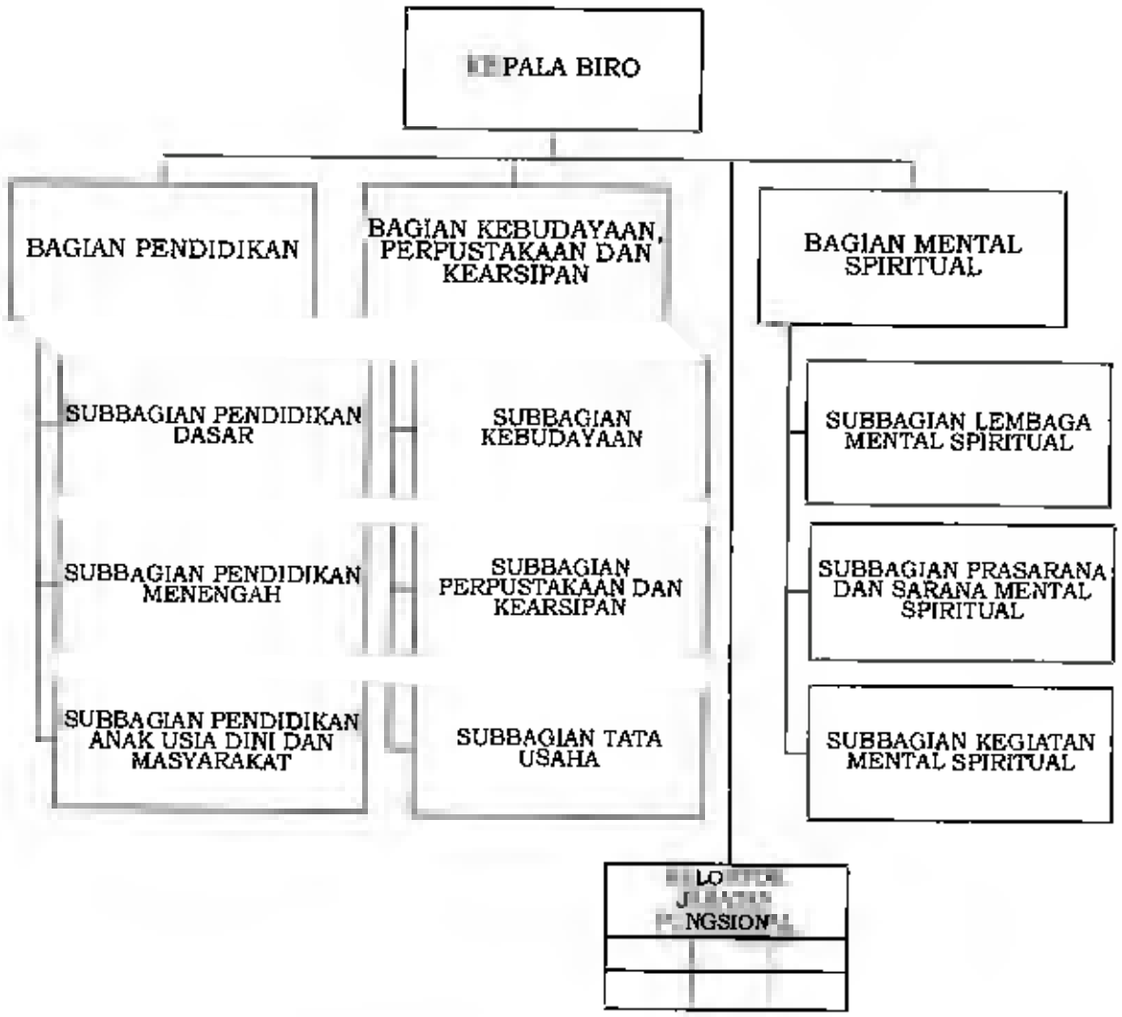


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN